

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018

Disampaikan oleh:

Ir. Yerry Yanuar, MM

Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Barat

Cirebon, 16 Februari 2017

Sukses Perencanaan Sukses Implementasi



Pemerintah Provinsi Jawa Barat



SISTEMATIKA PAPARAN

1

Pendahuluan

2

Capaian Kinerja Pembangunan Tahun 2015 - 2016

3

Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2018

4

Kebijakan Pendanaan Pembangunan Tahun 2018

5

Mekanisme Rangkaian Musrenbang Tahun 2018



1

Pendahuluan

SOSOK MASA DEPAN JAWA BARAT 2025

RANCANGAN : SOSOK SUMBER DAYA INSANI JAWA BARAT YANG AGAMIS DENGAN PENCIRI UTAMA:

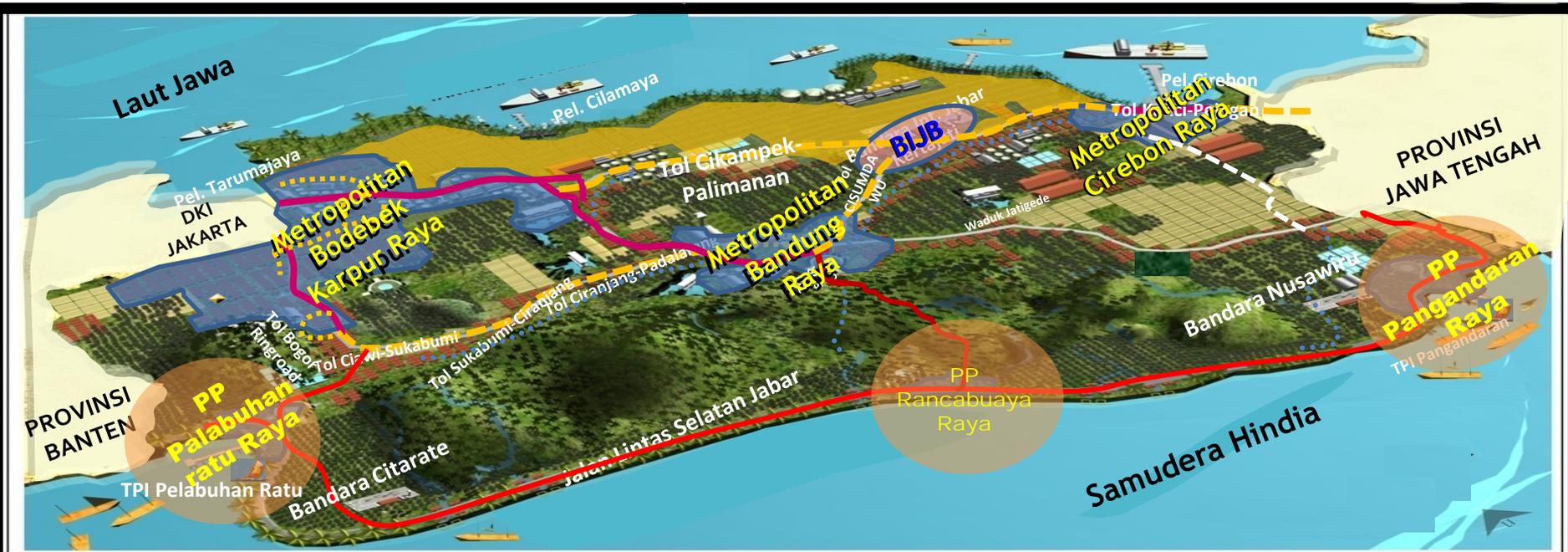
5 NILAI-NILAI LUHUR :

1. JUJUR DAN KONSISTEN
2. TANGGUH DAN DISIPLIN
3. KEPELOPORAN DAN KETELADANAN
4. RAMAH DAN BIJAKSANA
5. KEBERSAMAAN DAN KESETARAAN

7 KARAKTER :

1. SEHAT, CERDAS DAN CERMAT
2. PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING TINGGI
3. MANDIRI DAN PANDAI MENGATUR DIRI
4. BERDAYA TAHAN TINGGI DALAM PERSAINGAN
5. PANDAI MEMBANGUN JEJARING DAN PERSAHABATAN GLOBAL
6. BERINTEGRITAS TINGGI
7. BERMARTABAT

● SOSOK PEMBANGUNAN FISIK JAWA BARAT TAHUN 2025



ILUSTRASI JAWA BARAT TAHUN 2025

JAWA BARAT GREEN PROVINCE

VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 - 2025

DAN

VISI PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 - 2018

VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 – 2025
DENGAN IMAN DAN TAKWA,
PROVINSI JAWA BARAT TERMAJU DI INDONESIA



TUJUH BIDANG UNGGULAN SEBAGAI PENCIRI **Jawa Barat TERMAJU DI INDONESIA TAHUN 2025**

1. **PENYELENGGARAAN** Pemerintahan YANG Bermutu (Beyond the expectation), Akuntabel dan BERBASIS Ilmu Pengetahuan.
2. Masyarakat Yang Cerdas, Produktif dan Berdaya Saing **TINGGI**.
3. **PENGELOLAAN** Pertanian dan Kelautan.
4. Energi Baru dan **TERBAHARUKAN SERTA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**.
5. Industri Manufaktur, **INDUSTRI JASA** dan **INDUSTRI KREATIF**.
6. *Infrastruktur Yang Handal dan Pengelolaan Lingkungan Hidup YANG BERIMBANG Untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan.*
7. Pengembangan Budaya Lokal dan Menjadi Destinasi Wisata **DUNIA**.

VISI PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2013-2018

JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA

MISI

MISI PERTAMA :

Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing

MISI KEDUA :

Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan

MISI KETIGA :

Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik

MISI KEEMPAT :

Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan

MISI KE LIMA :

Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal

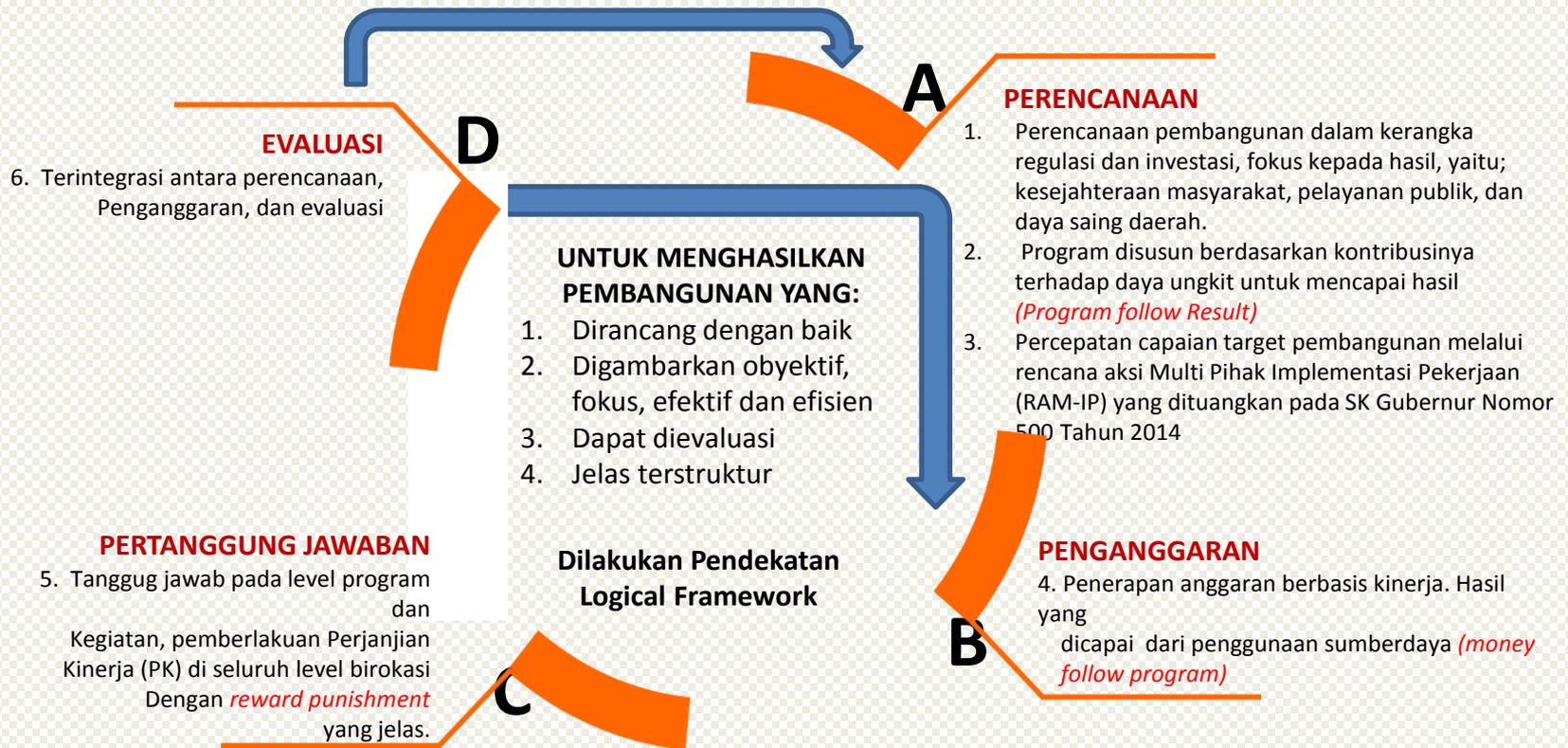


JANJI GUBERNUR JAWA BARAT



1. PENDIDIKAN **GRATIS SD, SLTP DAN SLTA** DI SELURUH JAWA BARAT.
2. **BEASISWA** PENDIDIKAN UNTUK PEMUDA, TENAGA MEDIS, SERTA KELUARGA ATLET BERPRESTASI DAN GURU
3. REVITALIASI **POSYANDU** DAN **DANA OPERASIONAL KADER POSYANDU**
4. MEMBUKA 2 JUTA LAPANGAN KERJA **BARU** DAN MENCETAK **100.000 WIRUSAHAAN BARU** JAWA BARAT
5. ALOKASI **4 TRILIYUN** UNTUK **INFRASTRUKTUR DESA DAN PERDESAAN**
6. REHABILITASI 100.000 **RUMAH** RAKYAT MISKIN
7. PEMBANGUNAN **PUSAT SENI DAN BUDAYA JAWA BARAT** DI **KABUPATEN/ KOTA**
8. PEMBANGUNAN **GELANGGANG OLAHRAGA** DI **KABUPATEN/ KOTA**

ARAHAN GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT REFORMASI PERENCANAAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA



Sumber : Ahmad Heryawan; 2016

INTEGRASI SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA DALAM RANGKA PENGENDALIAN CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA PROVINSI JAWA BARAT



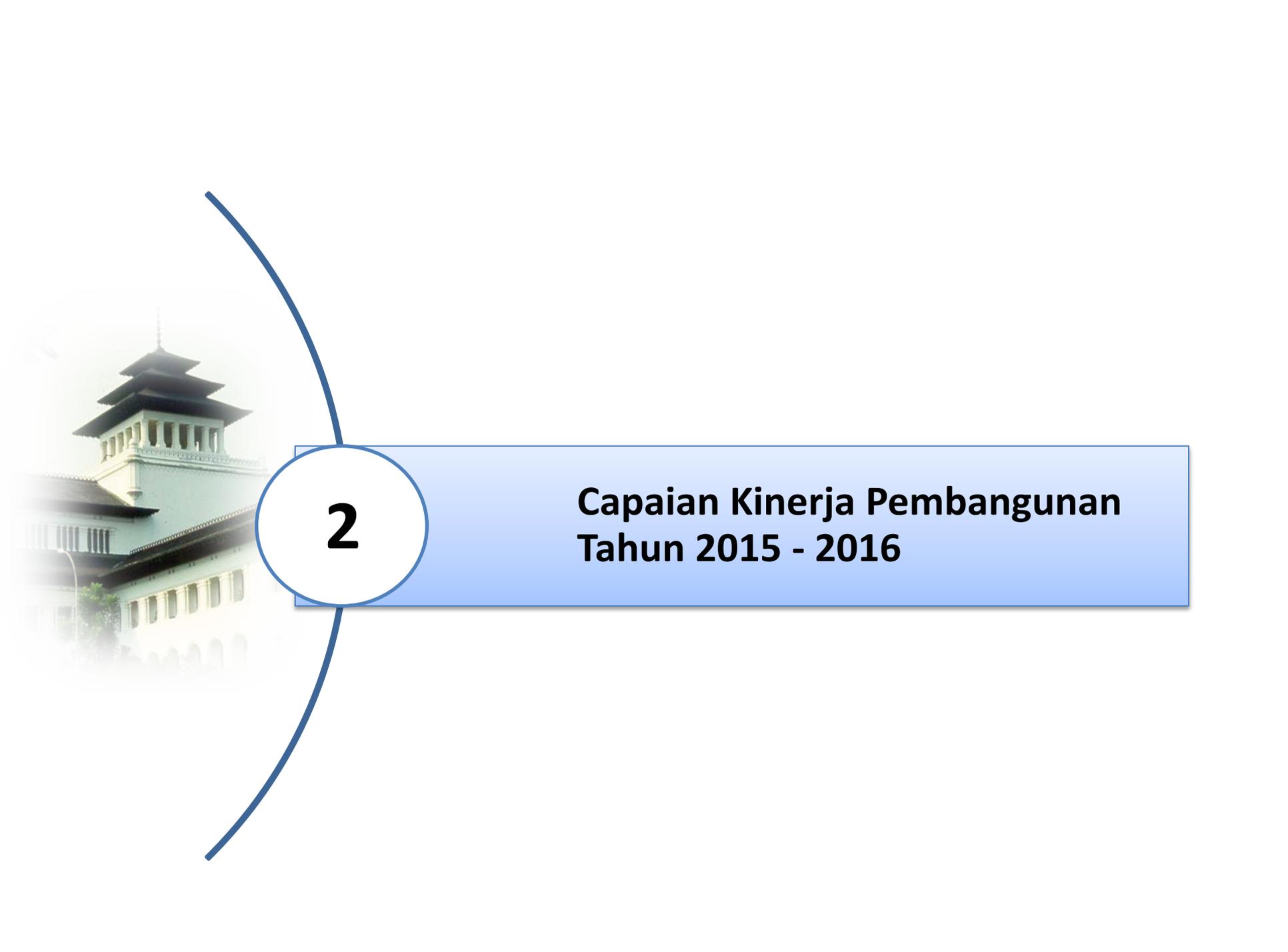
Sumber : Ahmad Heryawan,2016



Rekomendasi **BPK RI** terkait Pemeriksaan Proses Perencanaan Tahun 2014 – 2016

- Proses Perencanaan dan Penganggaran harus **SESUAI JADWAL** yang telah ditetapkan disertai **REKAM JEJAK** pada setiap tahapan.
- Setiap usulan kegiatan harus **DILENGKAPI** dengan **SURAT PENGANTAR** dan **PROPOSAL** (baik BL maupun BTL).
- Perubahan usulan Kegiatan disertai dengan perubahan **PROPOSAL** dan **BERITA ACARA**.
- Penentuan **LOKASI** pada setiap kegiatan harus spesifik (jelas dan terukur).

**PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2018
DIKAWAL OLEH KPK !!!
(TEPAT WAKTU, TEPAT SASARAN, TEPAT ADMINISTRASI)**



2

**Capaian Kinerja Pembangunan
Tahun 2015 - 2016**

JAWA BARAT DALAM KONSTELASI NASIONAL

POTENSI JAWA BARAT DALAM KONSTELASI NASIONAL :

- JUMLAH PENDUDUK TERBANYAK 47,38 JUTA JIWA (2016, Proyeksi BPS)
- PUSAT KEGIATAN INDUSTRI MANUFAKTUR DAN STRATEGIS NASIONAL
- INSTALASI VITAL NASIONAL (PENDIDIKAN, LITBANG DAN HANKAM), DIANTARANYA BERKELAS DUNIA
- BERBATASAN DENGAN IBUKOTA NEGARA
- MEMILIKI TIGA PUSAT KEGIATAN NASIONAL (PKN) DAN 3 PKN-P
- MEMILIKI KONDISI ALAM DENGAN STRUKTUR GEOLOGI YANG KOMPLEKS
- MEMILIKI TAMAN NASIONAL, SUAKA MARGASATWA DAN CAGAR ALAM

KONTRIBUSI JAWA BARAT TERHADAP NASIONAL :

- BERKONTRIBUSI THD PDB NASIONAL 2015 : 13,22%
- KONTRIBUSI TERHADAP PDB SEKTOR INDUSTRI MANUFAKTUR 2015 : 27,28%

KONTRIBUSI JAWA BARAT TERHADAP REGIONAL JAWA BALI :

- LINTASAN UTAMA ARUS REGIONAL BARANG DAN PENUMPANG SUMATERA-JAWA-BALI
- PMDN TERTINGGI DI P. JAWA-BALI
- PENYEDIA LISTRIK DENGAN KAPASITAS DAYA TERPASANG 4.654 MW : PLTA 1.941 MW, PLT GEOTERMAL 1.061 MW, LAINNYA 1.652 MW
- LUAS KAWASAN HUTAN TERBESAR DI JAWA-BALI SEBESAR (1,04 JT HA)
- MEMILIKI 40 DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
- MERUPAKAN TUJUAN WISATA
- DEBIT AIR PERMUKAAN 81 MILYAR M³/TAHUN DAN AIR TANAH 150 JT M³/TAHUN

KONTRIBUSI JAWA BARAT TERHADAP IBUKOTA NEGARA :

- PENYEDIA AIR BAKU UNTUK DKI
- PENYEDIA BAHAN PANGAN UNTUK DKI
- PENYEDIA LAHAN DAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG AKTIVITAS DKI

Luas Jawa Barat :
3.709.528,44 ha

PROVINSI JAWA BARAT (KONDISI TAHUN 2015)



Proyeksi Perkembangan Jumlah Penduduk



- Kabupaten/Kota : 27
- Luas : 3.709.528,44 Ha
- Kecamatan : 626
- Kelurahan : 641
- Desa : 5.321

Penduduk

- LPP : 1,52%
- Indonesia (2015) : 255.461.700 Jiwa
- Jabar (2015) : 46.71 Jiwa
- Penduduk Miskin (2015) : 9,57 %

- Kemantapan Jalan : 97,80%
- Rasio elektrifikasi : 94,04%
- Pelayanan Air Minum : 67,13%
- Irigasi Kondisi Baik : 69,65%
- Kawasan Lindung : 37,40% (2014)

- PDRB (2015) : Rp.1.525,15 Trilyun (adhb);
- PDRB per kapita (2015) : Rp.32.65 Juta (adhb)
- Inflasi (2015) : 2.73%
- LPE (2015) : 5,03%
- IPM (2015) : 69.50% (MB)
- RLS (2015) : 7,86 th (MB)

- AHH (2015) : 72,41 th
- APK PAUD : 64.11 % (2014 - 2015)*
- APK SD : 109.42 % (2014 - 2015)*
- APK SMP : 98.91 % (2014 - 2015)*
- APK SMA : 62.11 % (2014 - 2015)*
- APK PT : 17,47 % (2013 - 2014)

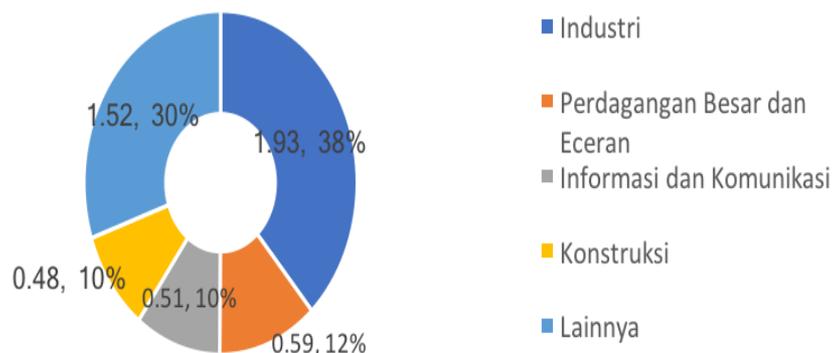
Sumber: Badan Pusat Statistik dan *Kemendikbud



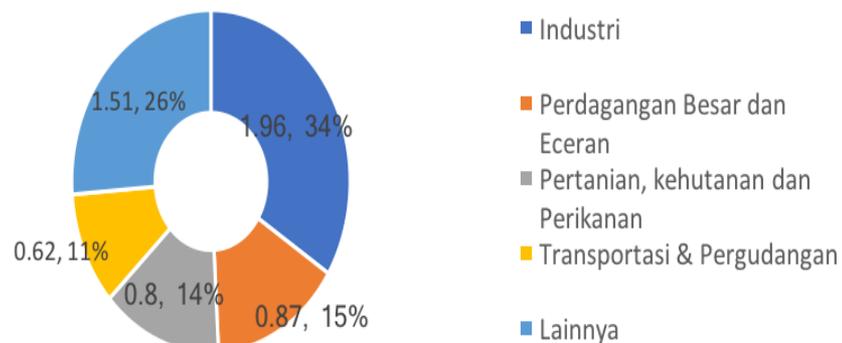
PERTUMBUHAN EKONOMI JAWA BARAT TAHUN 2015 & 2016

Sumber Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha (Persen)

2015



2016

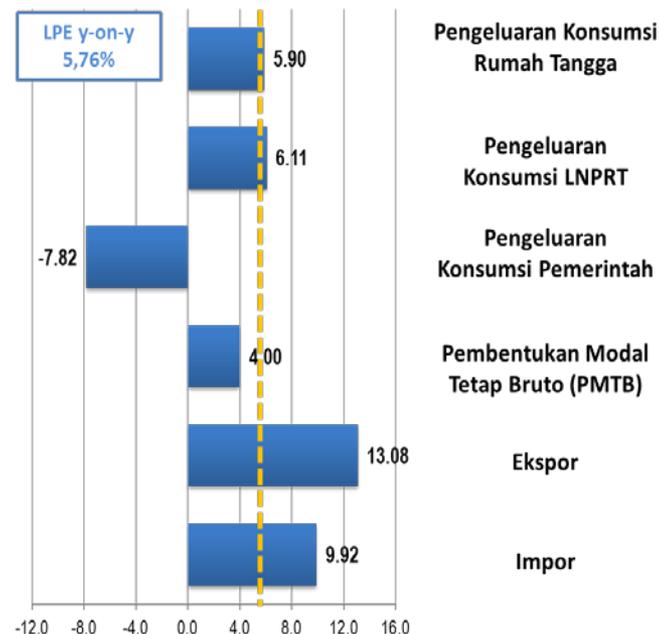


Hingga triwulan III, laju pertumbuhan ekonomi terbesar dari lapangan usaha perekonomian Jawa Barat ada pada lapangan usaha informasi dan komunikasi (tumbuh sebesar 13,66%), lapangan usaha transportasi dan pergudangan serta lapangan usaha jasa keuangan dan transportasi - 12,99% dan 10,25%.

dilihat dari sisi pengeluaran, peningkatan kinerja terjadi pada hampir seluruh komponen, Ekspor Barang dan Jasa tumbuh sebesar 13,08 persen; Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 6,11 persen; Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) sebesar 5,90 persen dan Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 4,00 persen dan Perubahan Inventori sebesar 3,75 persen

Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran (Persen)

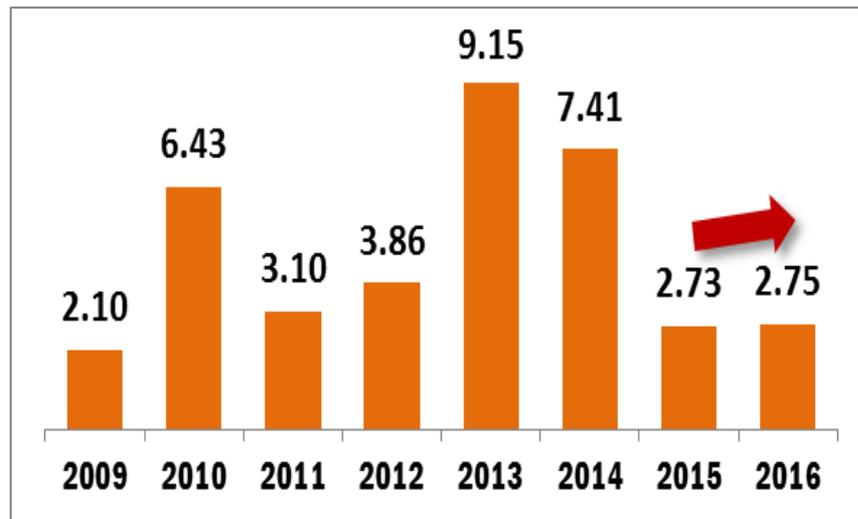
Pertumbuhan Ekonomi
y-on-y (%)





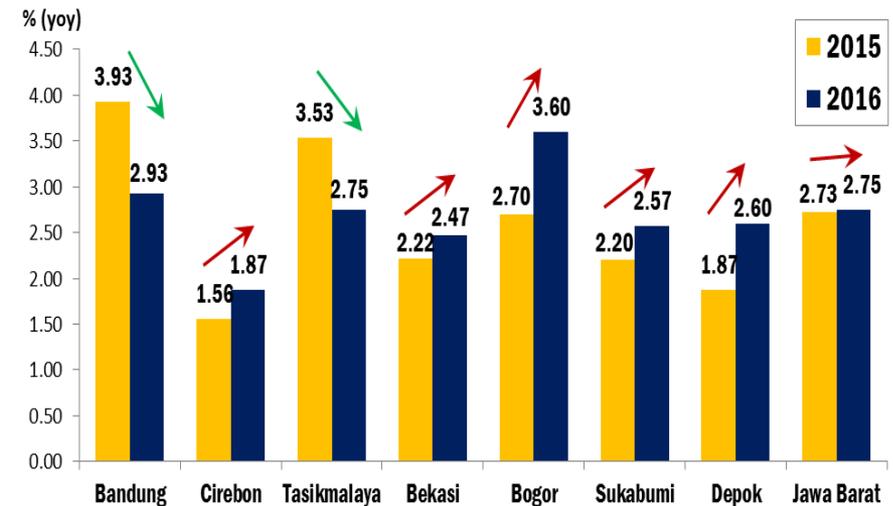
STABILITAS EKONOMI: PERKEMBANGAN INFLASI JAWA BARAT (1)

Perkembangan Inflasi IHK Tahunan (yoy)



- Inflasi IHK Jawa Barat pada tahun 2016 mencapai 2,75% (yoy), sedikit lebih tinggi dibanding inflasi tahun 2015 sebesar 2,73% (yoy). Namun demikian realisasi ini masih lebih rendah dibanding rata-rata historis inflasi tahunan 2011-2015 sebesar 5,25% (yoy).

Perkembangan Inflasi Spasial 2015 dan 2016 (% , yoy)

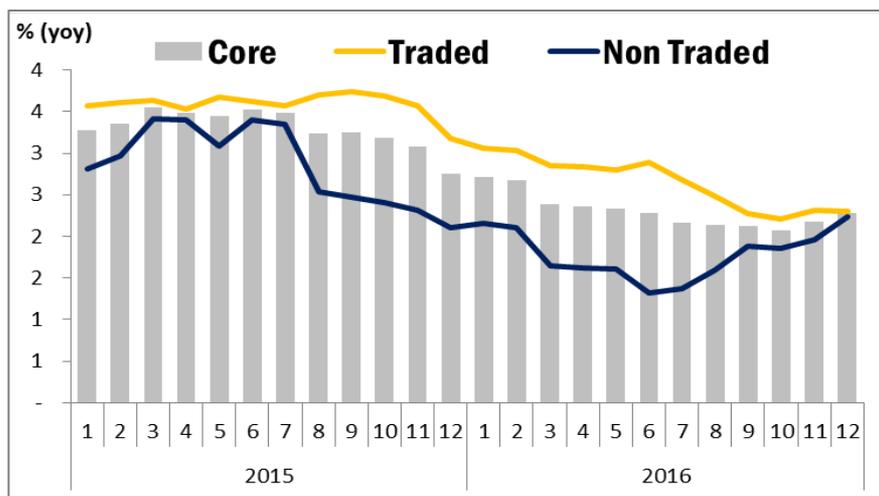


- Secara spasial, inflasi mayoritas kota perhitungan di Jawa Barat pada tahun 2016 meningkat dibanding tahun 2015 didorong oleh gejolak harga pangan, kecuali di Kota Bandung dan Tasikmalaya. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Bogor (3,60%) dan terendah di Kota Cirebon (1,87%).

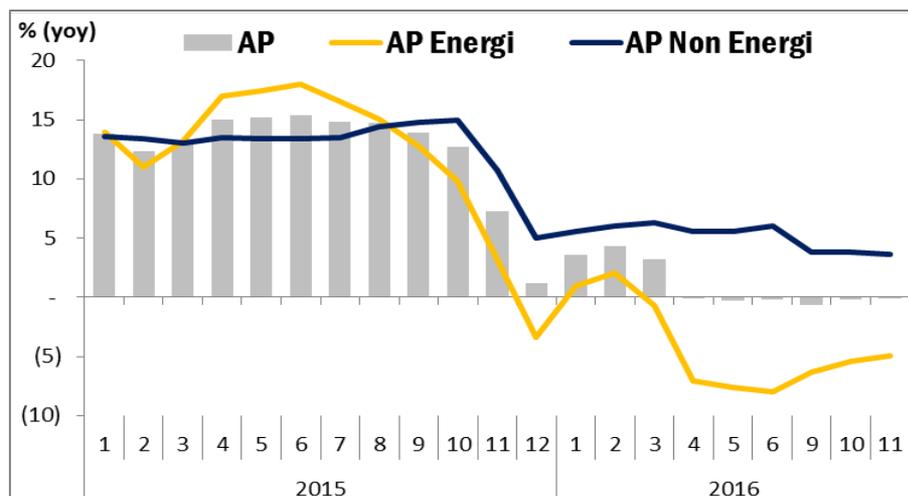


STABILITAS EKONOMI: PERKEMBANGAN INFLASI JAWA BARAT (2)

Perkembangan Komponen Inflasi Core



Perkembangan Komponen Inflasi Administered Prices



- inflasi kelompok *core* tercatat menurun yakni dari 2,76% (yoy) pada tahun 2015 menjadi 2,28% (yoy) pada tahun 2016. Realisasi ini juga lebih rendah dibandingkan rata-rata inflasi *core* historis 2011-2015 sebesar 3,66%. Rendahnya inflasi *core* terutama didorong oleh masih terbatasnya permintaan masyarakat di tengah *uncertainty* perekonomian

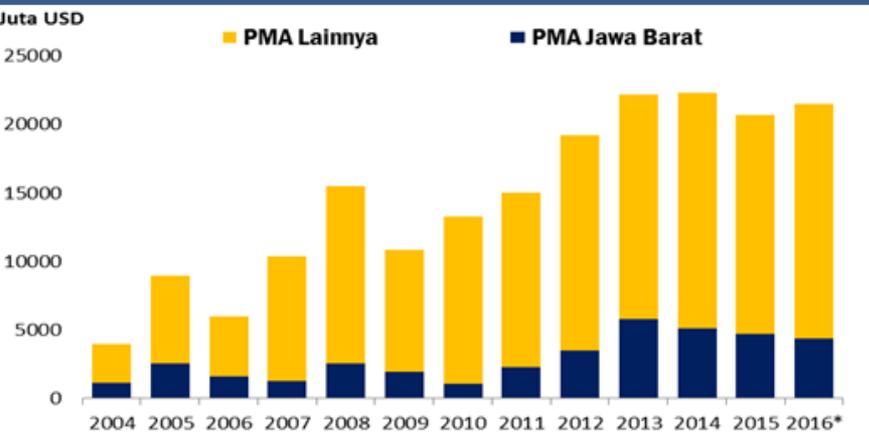
- Inflasi kelompok *administered prices* tercatat menurun yakni dari 1,18% (yoy) pada tahun 2015 menjadi -0,04% (yoy) pada tahun 2016. Realisasi ini juga lebih rendah dibandingkan rata-rata inflasi *core* historis 2011-2015 sebesar 7,46%. Rendahnya inflasi *administered prices* ini terutama didorong oleh penurunan pada kelompok AP energi.



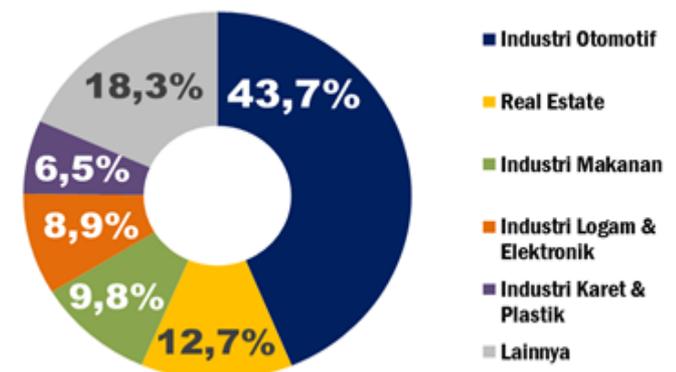
REALISASI INVESTASI: PERKEMBANGAN PMA DAN PMDN JAWA BARAT

Pertumbuhan PMDN ke Jawa Barat selama dua tahun terakhir menurun. Namun pertumbuhan PMA terus meningkat khususnya ke sektor industri pengolahan. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu tujuan investasi utama dengan pangsa terhadap nasional untuk PMA mencapai 20,4 persen dan PMDN mencapai 14,1 persen.

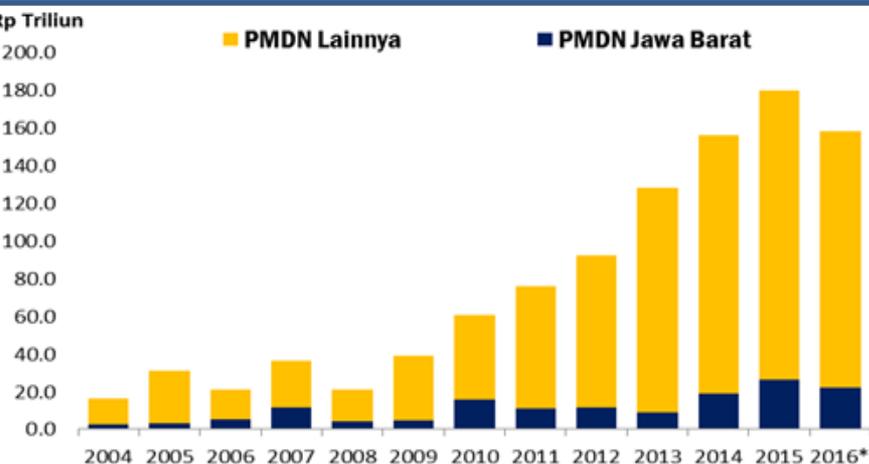
Perkembangan PMA di Jawa Barat, 2004 – 2016



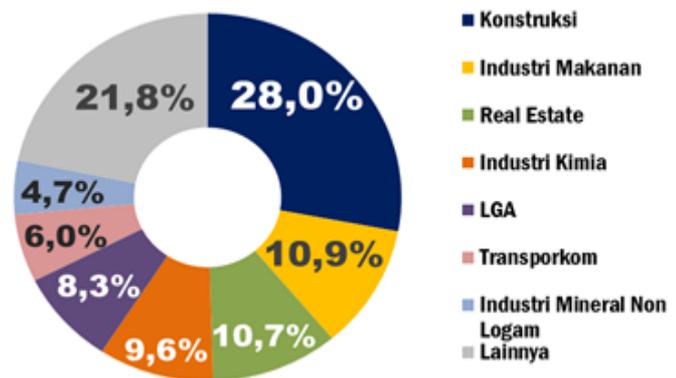
Pangsa PMA Sektoral di Jawa Barat



Perkembangan PMDN di Jawa Barat, 2004 – 2016

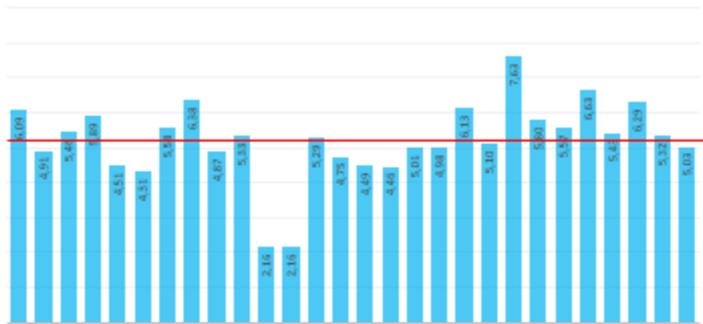


Pangsa PMDN Sektoral di Jawa Barat

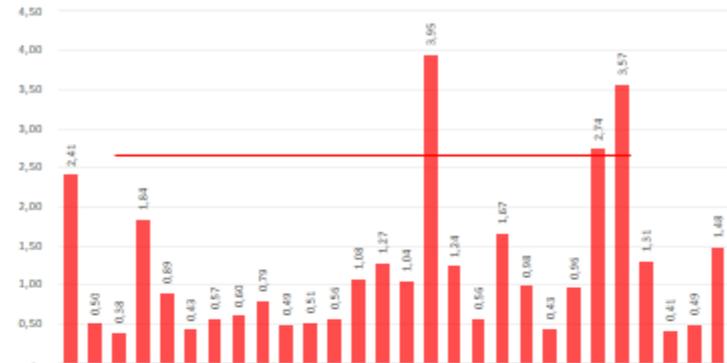


Perkembangan Makro Kabupaten/Kota Tahun 2015

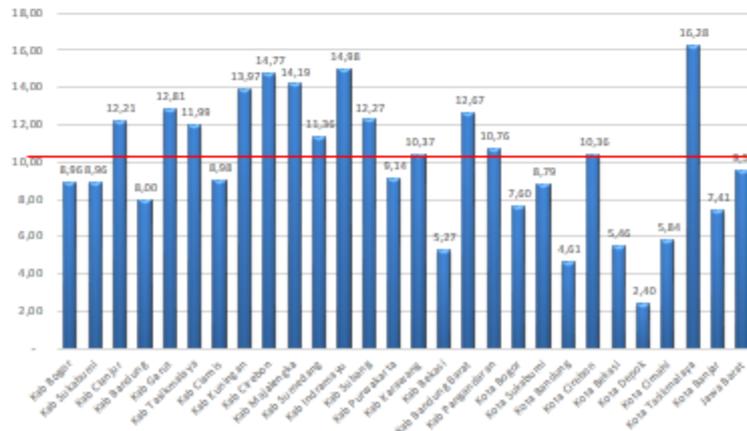
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN KOTA DI JAWA BARAT 2015



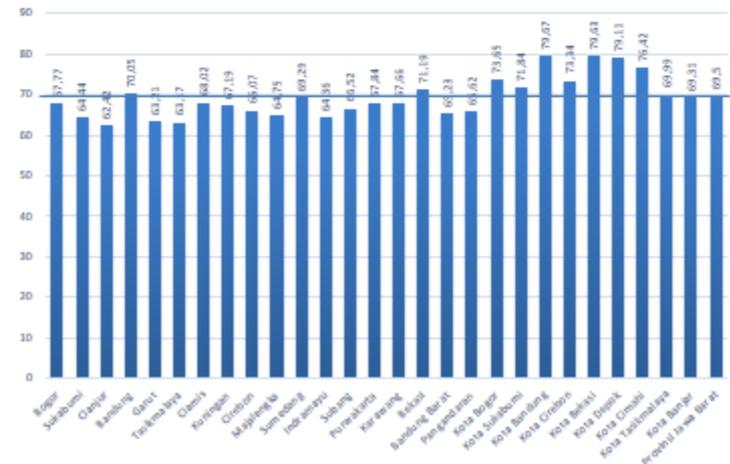
LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK KABUPATEN KOTA DI JAWA BARAT 2015



Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kota Di Jawa Barat Tahun 2015

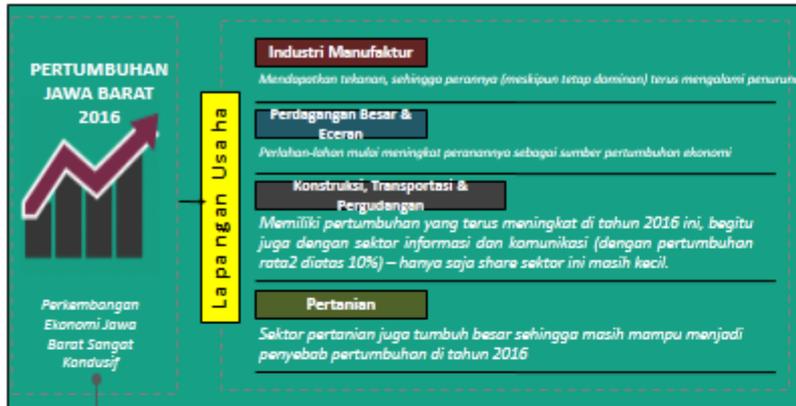


Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kota Di Jawa Barat Tahun 2015



Kondisi Ekonomi Jawa Barat Tahun 2016

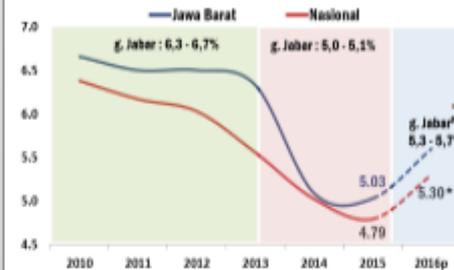
Pertumbuhan Jawa Barat Tahun 2016



18

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat

Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat sejak tahun 2010 hingga tahun 2015 berkisar 6,02 % (yoy). Walaupun perlahan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat di tahun 2016 (5,3%-5,7%) masih berada di bawah rata-rata historisnya, namun menunjukkan mulai adanya pemulihan pada kinerja perekonomian khususnya dibandingkan dengan tahun 2014 dan 2015 yang tumbuh pada kisaran 3,0%-3,1%. Perekonomian Jawa Barat sejak tahun 2010 selalu tumbuh di atas Nasional.



*Asumsi dalam APBN P 2016
** Proyeksi ekonomi Jawa Barat

19

Pertumbuhan dua sektor utama (industri pengolahan dan perdagangan) di tahun 2016 diperkirakan masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan historisnya (2011-2015), sedangkan sektor pertanian diperkirakan tumbuh di atas rata-rata historisnya.



Investasi Jawa Barat

20

Selain dengan terbatasnya pertumbuhan ekonomi domestik, pertumbuhan PMDN ke Jawa Barat selama dua tahun terakhir menurun. Namun pertumbuhan PMA terus meningkat khususnya ke sektor industri pengolahan. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu tujuan investasi utama dengan pangsa terhadap nasional untuk PMA mencapai 20,4% dan PMDN mencapai 14,1%

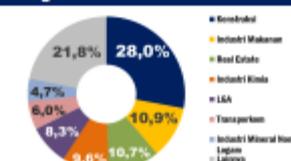


Sumber: BKPM RI (Realisasi) *) s.d. Tw III 2016

Pangsa PMA Sektoral di Jawa Barat

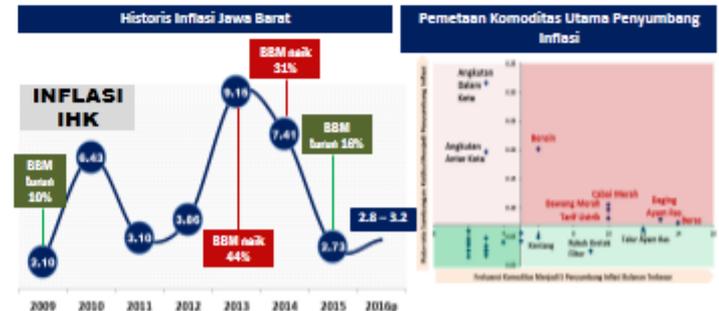


Pangsa PMDN Sektoral di Jawa Barat



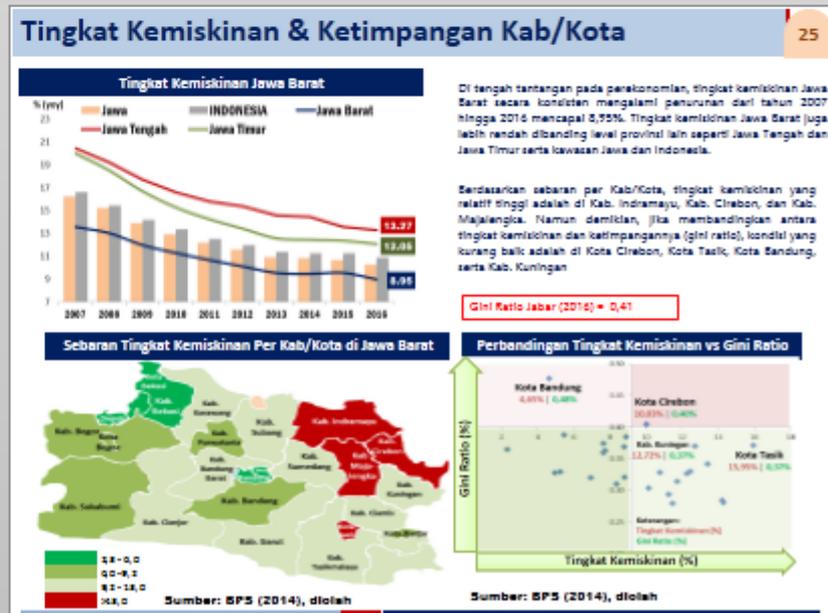
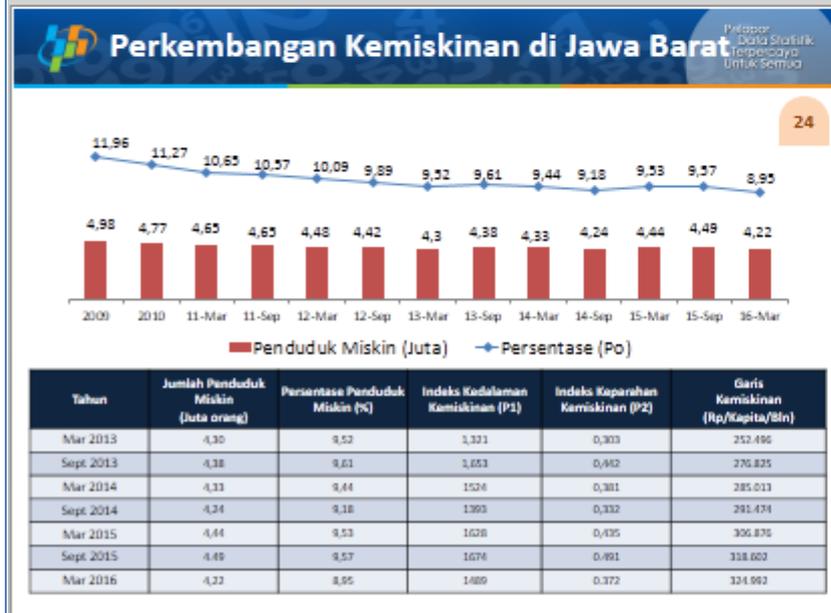
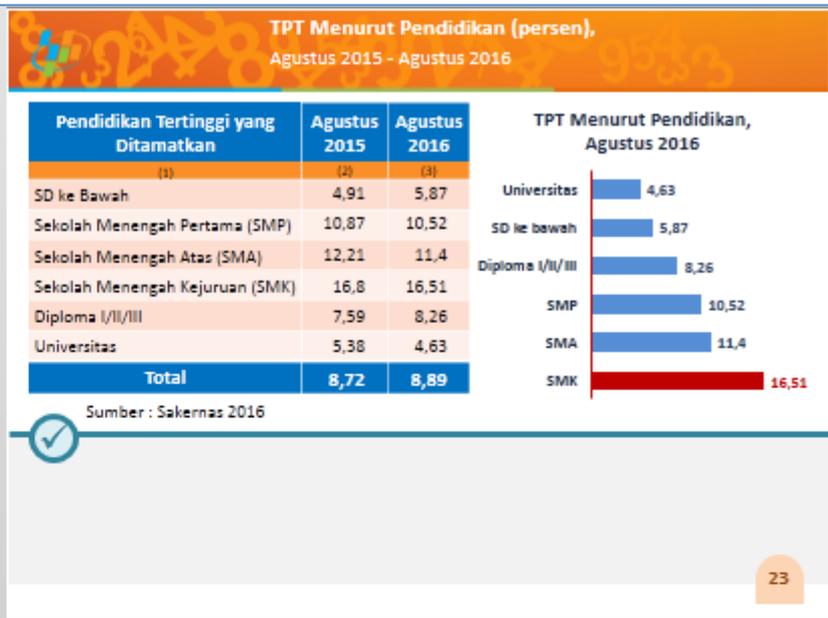
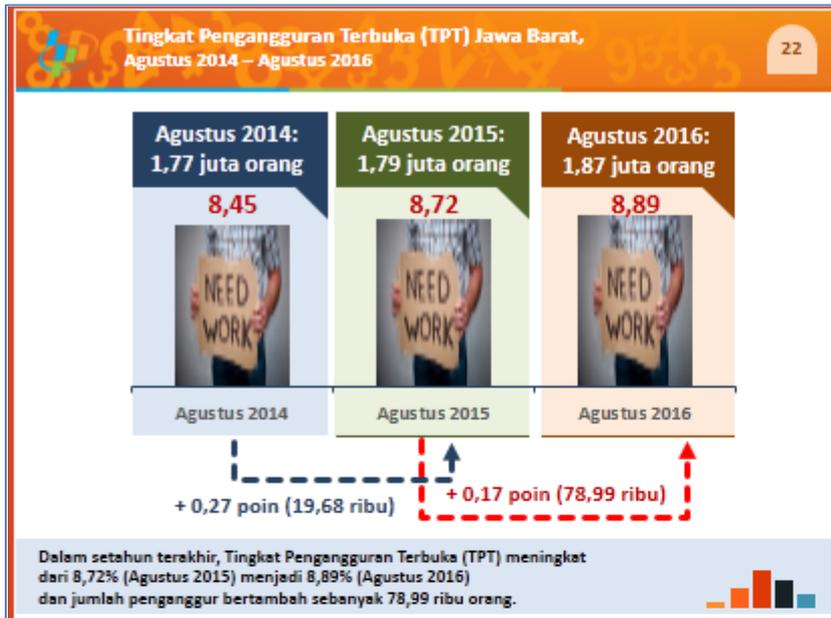
Inflasi Jawa Barat

Inflasi Jawa Barat masih terkendali dalam level yang cukup rendah. Hal ini seiring dengan tren core inflation yang menurun. Inflasi Jawa Barat pada akhir tahun 2016 diperkirakan pada kisaran 2,6– 3,2% (yoy). Adapun komoditas yang memiliki frekuensi menjadi penyumbang inflasi bulanan terbesar serta dengan andil yang juga tergolong besar adalah beras, daging ayam ras, cabai merah, dan bawang merah. Komoditas-komoditas ini menjadi fokus utama Bank Indonesia dalam rangka pengendalian inflasi daerah.



Sumber: BPS dan Proyeksi BI

Pengangguran dan Kemiskinan Jawa Barat Tahun 2016



3 Revitalisasi Posyandu dan Dana Operasional Kader Posyandu

Target RPJMD Jawa Barat 2013-2018

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat dengan sasaran program meningkatnya strata Posyandu multifungsi



Posyandu terbangun (2015):
20857 dari 50374 Posyandu

= **41,4%**

Masih tersisa 4.143
posyandu yang perlu
direvitalisasi demi
mencapai target 49,63%
pada tahun 2015
(target 2015 **BELUM
TERCAPAI**)

Tahun	Target Revitalisasi Posyandu	
	(unit)	(persen)
2014	15.000	29,77
2015	25.000	49,63
2016	35.000	69,48
2017	45.000	89,33
2018	50.000	99,26

Untuk mencapai target revitalisasi
50.000 posyandu, maka **BEBAN**
Kabupaten/Kota hingga Tahun
2018: **29.143 Posyandu**

CAPAIAN KINERJA JANJI KAMPANYE GUBERNUR

5 Alokasi 4 Trilyun untuk Infrastruktur Desa dan Perdesaan

Rencana: 3.860 Desa
Realisasi: 3.855 Desa

5 desa di Kab. Sumedang dan 1.451 desa jml bantuannya diluar 100 juta

Rencana: 5.321 Desa
Realisasi: 5.315 Desa

5 desa di Kab. Sumedang, dan 1 desa di Kab. Cirebon tidak mengajukan

Rencana: 5.321 Desa
Realisasi: 5.312 Desa

6 desa di Kab. Sumedang, dan 1 desa di Kab. Subang tidak mengajukan 2 desa di Kab. Bekasi berubah status menjadi kelurahan

19 KABUPATEN MENDAPATKAN BANTUAN TAHUN 2015 TOTAL 5.321 DESA SAJUDAH JUMLAH DANA

2013

2014

2015

2016

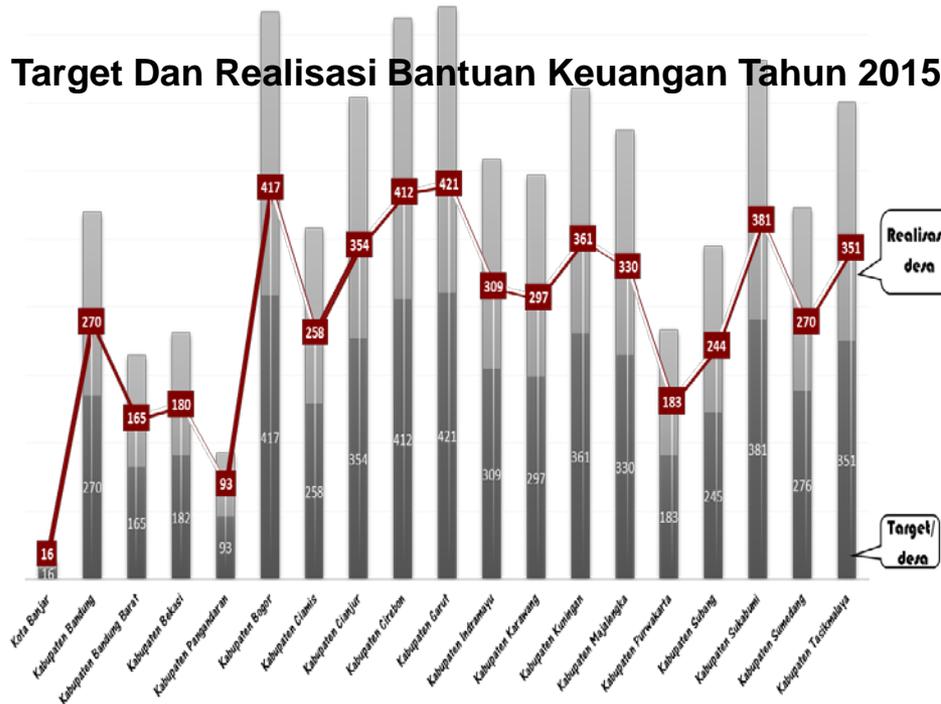
2017



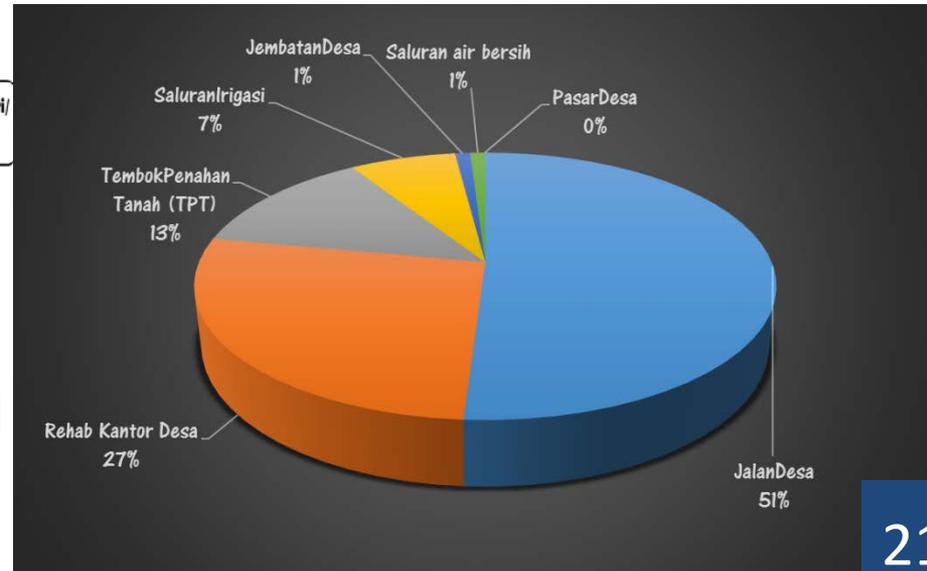
2018

? Perlu intervensi terhadap 25.000 desa untuk mencapai target 40.000 desa di tahun 2018

Target Dan Realisasi Bantuan Keuangan Tahun 2015



CAPAIAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN TAHUN 2015



CAPAIAN KINERJA JANJI KAMPANYE GUBERNUR

RUMAH TINGGAL LAYAK HUNI (RUTILAHU)

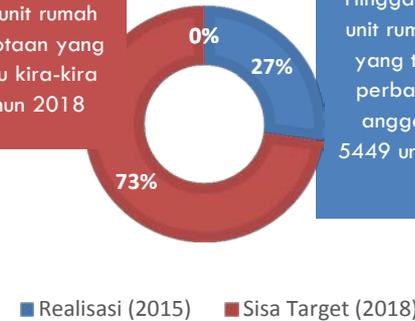
6 Rehabilitasi 100.000 Rumah Rakyat Miskin



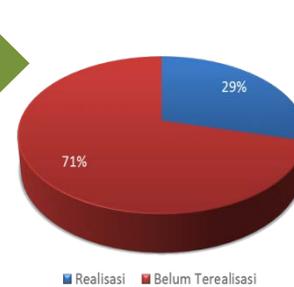
Perkotaan
20 ribu unit

Perdesaan
80 ribu unit

Masih tersisa 14551 unit rumah tidak layak huni perkotaan yang belum diperbaiki atau kira-kira 73% dari target tahun 2018



Hingga tahun 2015, jumlah unit rumah tidak layak huni perkotaan yang telah mendapatkan perbaikan menggunakan anggaran murni adalah 5449 unit atau 27,25% dari target 2018



Hingga tahun 2014, jumlah unit rumah tidak layak huni pedesaan yang mendapatkan perbaikan mencapai 23.260 unit atau sebesar 29% dari target 2018 sebesar 80.000 unit, dengan realisasi anggaran per 2014 sebesar 232,6 milyar.

ISU-ISU PEMBANGUNAN RUTILAHU



Penghuni rumah mengeluhkan kurangnya keterampilan tukang dalam proses rehabilitasi rumah tidak layak huni



Ketidaktepatan pemerintah desa/BKM dalam menghitung material bangunan, seperti bata, semen, dan pasir, sehingga masih ada rumah yang perbaikannya kurang maksimal



Daya tahan bangunan kurang baik (plafon bocor, tembok belum sampai tahap finishing, dan terjadi kerusakan pada usia bangunan yang baru 2 tahun



Kualitas bangunan antara penerima bantuan yang satu dengan lainnya tidak merata, ada yang hasil perbaikannya maksimal dan kurang maksimal



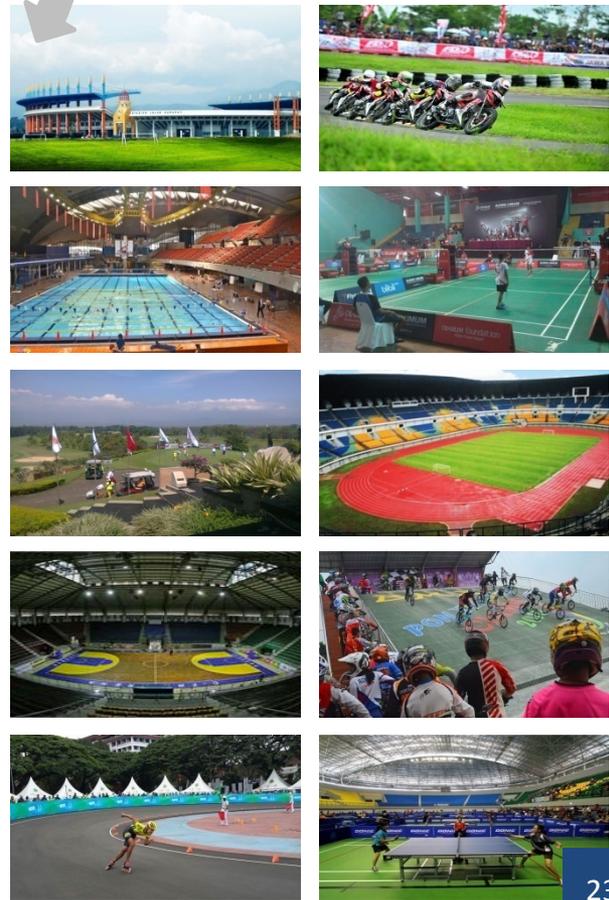
Ketidaksesuaian target anggaran RKPD dengan target anggaran RPJMD per tahunnya

CAPAIAN KINERJA JANJI KAMPANYE GUBERNUR

GELANGGANG OLAHRAGA DI KABUPATEN & KOTA



8 Pembangunan Gelanggang Olahraga di Kabupaten/Kota





3

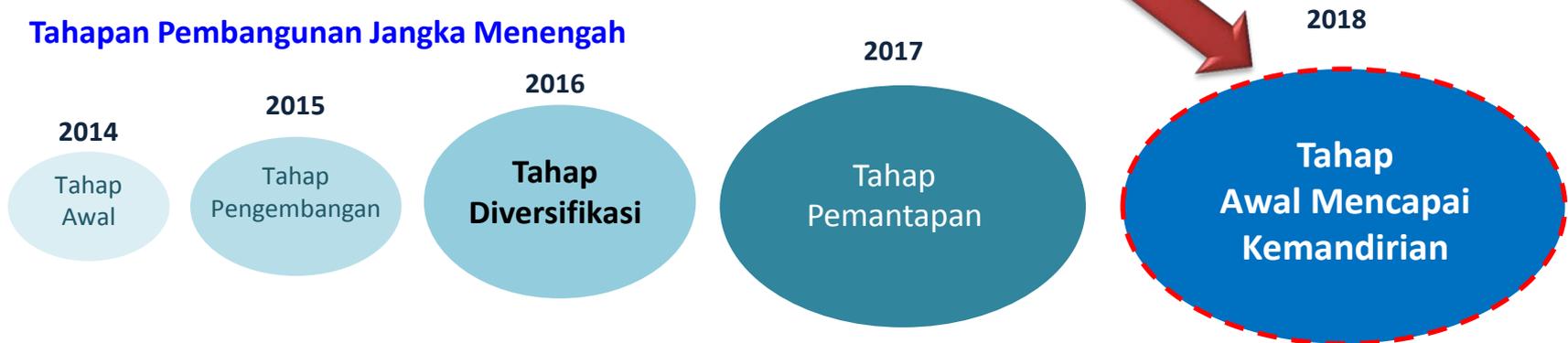
**Arah Kebijakan
Pembangunan Tahun 2018**

TAHAPAN PEMBANGUNAN

Tahapan Pembangunan Jangka Panjang



Tahapan Pembangunan Jangka Menengah



SANDINGAN RPJMD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 - 2018 DENGAN RPJMN TAHUN 2015 -2019

9 AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN (NAWA CITA)

RPJMD JAWA BARAT 2013-2018

3 FOKUS ALOKASI PADA PRIORITAS RPJMN

- C1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara
- C2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
- C3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
- C4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
- C5. Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia
- C6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
- C7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
- C8. Melakukan revolusi karakter bangsa
- C9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial indonesia

1. CG 1 : Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan (C5)
2. CG 2 : Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan(C5)
3. CG 3 Mengembangkan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku(C3), (C7)
4. CG 4 : Meningkatkan Ekonomi Pertanian (C7)
5. CG 5 : Meningkatkan Ekonomi Non Pertanian (C6)
6. CG 6 : Meningkatkan pengelolaan Sumberdaya Alam, lingkungan hidup dan kebencanaan (C7)
7. CG 7 : Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan dan Olahraga (C8), (C9)
8. CG 8 : Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan (C5)
9. CG 9 : Menanggulangi kemiskinan, Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial dan Keamanan (C1)
10. CG 10 Moderisasi Pemerintahan dan Pembangunan Perdesaan (C2), (C3), (C4)

- FOKUS 1 :
PEMBANGUNAN
SEKTOR
UNGGULAN**
- Kedaulatan Pangan
 - Energi
 - Ketenagalistrikan
 - Kemaritiman
 - Pariwisata

- FOKUS 2 :
PEMBANGUNAN
KEBUTUHAN
DASAR**
- Pendidikan
 - Kesehatan
 - Perumahan

- 17 SDGs**
1. Tanpa Kemiskinan
 2. Tanpa Kelaparan
 3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan
 4. Pendidikan Berkualitas
 5. Kesetaraan Gender
 6. Air Bersih dan Sanitasi
 7. Energi Bersih dan Terjangkau
 8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak
 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur
 10. Mengurangi Kesenjangan
 11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas
 12. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab
 13. Aksi Terhadap Iklim
 14. Kehidupan Bawah Laut
 15. Kehidupan di Darat
 16. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian
 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

- FOKUS 3 :
PENGURANGAN
KESENJANGAN**
- Antar kelompok Pendapatan
 - Antar Wilayah

PERKEMBANGAN INDIKATOR MAKRO PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 DAN 2016 SERTA TARGET TAHUN 2017 dan 2018

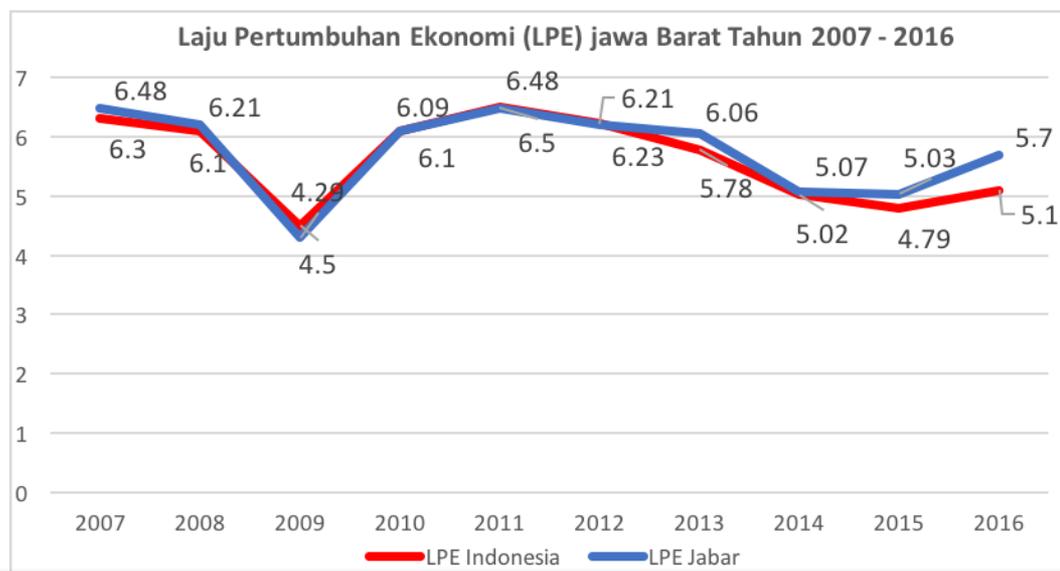
No	INDIKATOR	LKPJ 2015	LKPJ 2016	TARGET 2017	TARGET 2018
1.	a. Jumlah Penduduk (Ribu jiwa)	46.709.569	47.379.389	48.366,9	49.169,7
	b. Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,47	1,43	-	-
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.06 (5.04)	5,67	6,3 - 6,9	6,4 – 7,0
3.	Inflasi (%)	2.73	2.75	4,0 - 5,0	4,0 - 5,0
4.	Nilai PDRB Per Kapita (adhb) (Rp Juta Rupiah)	32,64	34,88	26,00 – 28,00	28,00 – 30,00
5.	Persentase Penduduk Miskin terhadap Jumlah Penduduk	9,57	8,77	5,00 - 4,10	5,00 - 4,10
6.	Laju Pertumbuhan Investasi (%) (adhb)	29,53	7,65	-	-
7.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,72	8,89	7,00 - 6,50	6,50 – 6,00
8.	Nilai Investasi/PMTB adhb (Rp. Trilyun)	396.36 (382.99)	412.30	267,2 - 287,2	315,3 - 335,3



TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI JAWA BARAT 2016-2018

Indikator	Satuan	Target		
		2016	2017	2018
Laju pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,3 – 6,9	6,3 – 6,9	6,4 – 7,0
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,50 – 7,00	7,00 - 6,50	6,50 – 6,00
Angka kemiskinan	Persen	5,90– 5,00	5,00 - 4,10	5,00 - 4,10
Gini Ratio	Poin	0,36 – 0,35	0,35 – 0,34	0,34 – 0,33

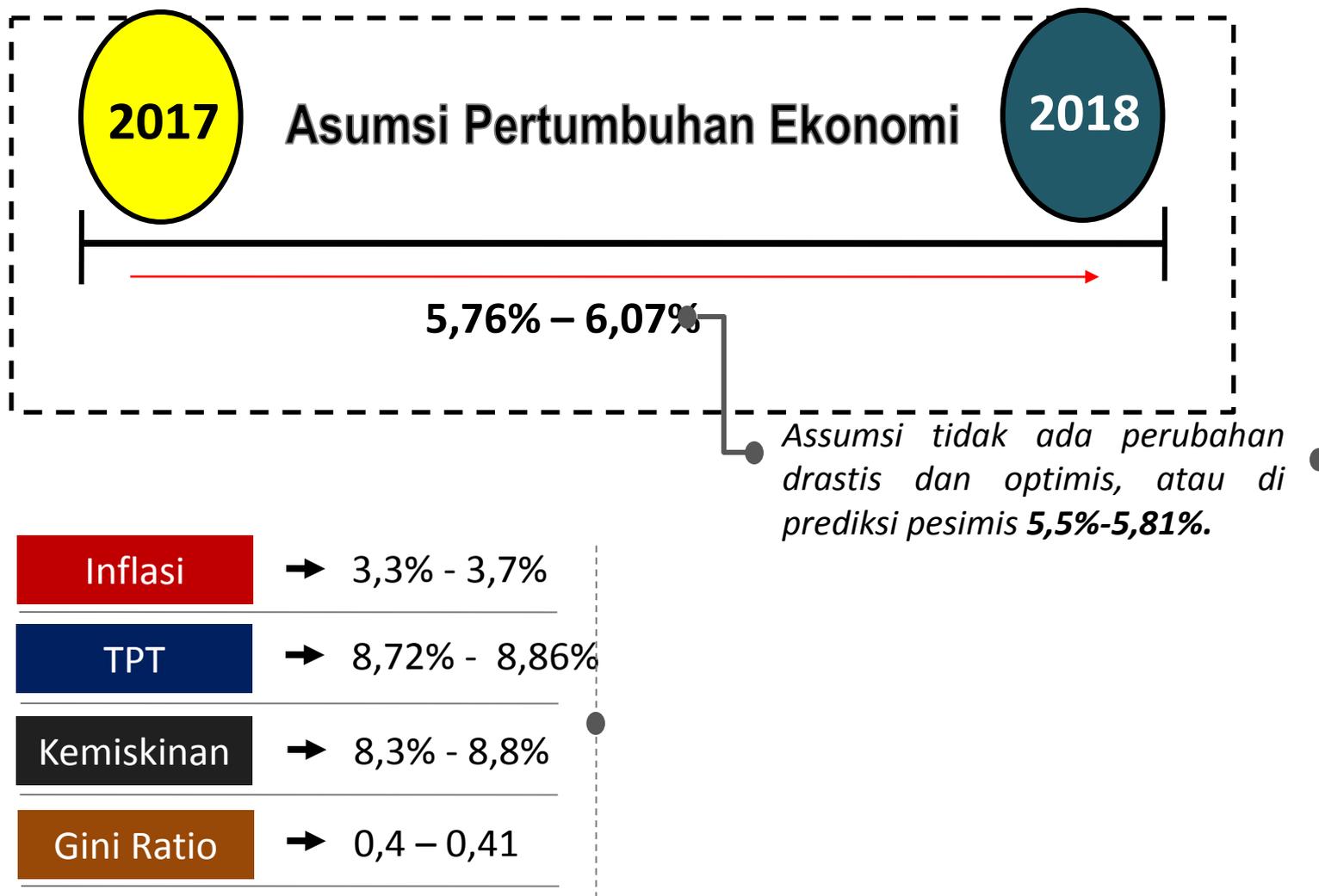
Sumber: RPJMD 2013-2018 Provinsi Jawa Barat



Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tumbuh sebesar 5,03% lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya tumbuh sebesar 4,79%, sedangkan di tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Jawa Barat bahkan tumbuh jauh lebih tinggi, diperkirakan akan mencapai 5,7% dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkirakan hanya sebesar 5,1% .



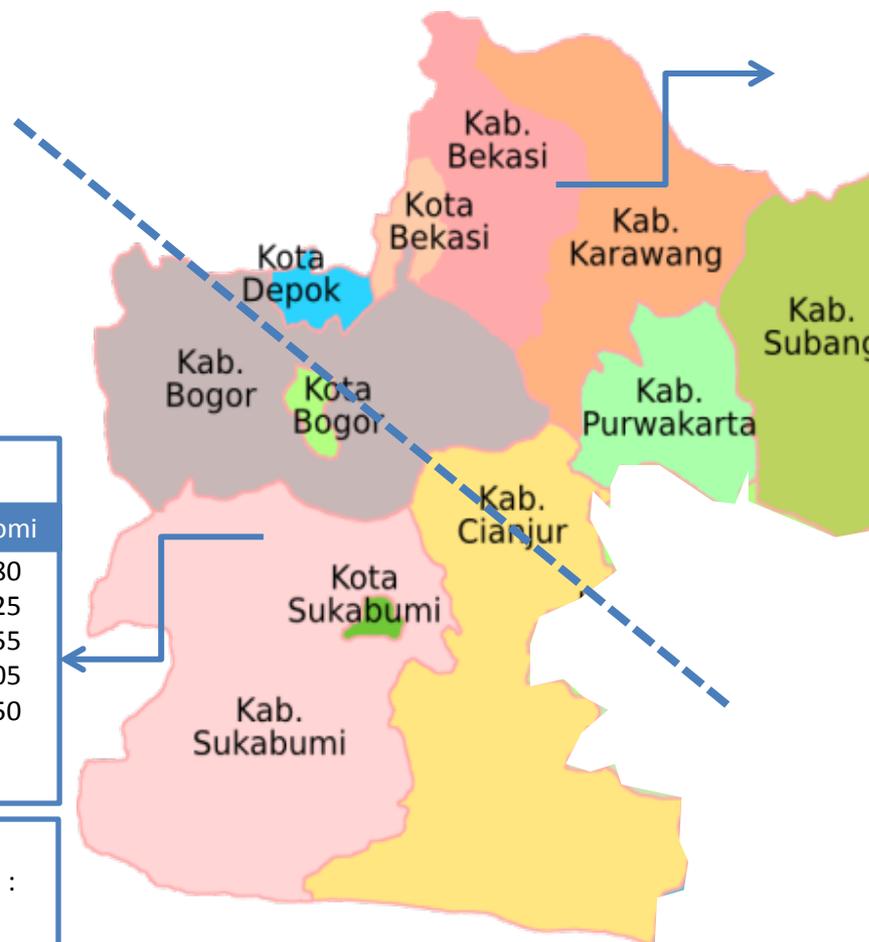
TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI JAWA BARAT 2016-2018



Sumber: Tim Ekonomi Makro Bappeda Provinsi Jawa Barat



DISTRIBUSI PERAN WILAYAH UNTUK MENCAPAI PERTUMBUHAN 6,4 – 7,0 PERSEN (RPJMD) SEKALIGUS PENGURANGAN KESENJANGAN ANTAR WILAYAH PADA TAHUN 2018



Wilayah I :

Target Sasaran Pertumbuhan Ekonomi :

1. Kabupaten Bogor : 6,80
2. Kabupaten Sukabumi : 5,25
3. Kabupaten Cianjur : 5,55
4. Kota Bogor : 6,05
5. Kota Sukabumi : 5,50
6. Kota Depok : 6,78

Sektor – Sektor yang memberi Kontribusi terbesar pada PDRB 2015 :

1. Industri Pengolahan
2. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor
3. Kontruksi
4. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Wilayah II :

Target Sasaran Pertumbuhan Ekonomi :

1. Kabupaten Bekasi : 7,00
2. Kabupaten Purwakarta : 7,61
3. Kabupaten Subang : 5,15
4. Kabupaten Karawang : 7,00
5. Kota Bekasi : 6,50

Sektor – Sektor yang memberi Kontribusi terbesar pada PDRB 2015 :

1. Industri Pengolahan
2. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor
3. Kontruksi
4. Transportasi dan pergudangan
5. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan



DISTRIBUSI PERAN WILAYAH UNTUK MENCAPAI PERTUMBUHAN 6,4 – 7,0 PERSEN (RPJMD) SEKALIGUS PENGURANGAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH PADA TAHUN 2018

Wilayah IV :

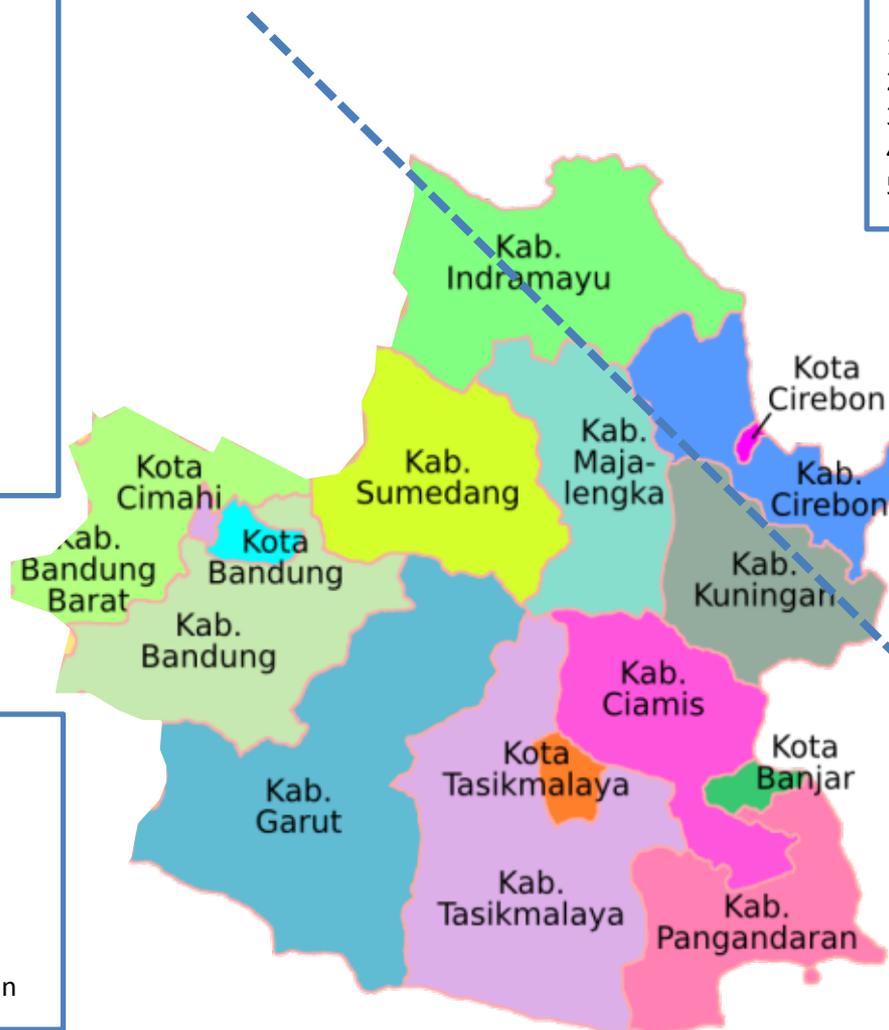
Target Sasaran Pertumbuhan Ekonomi :

1. Kabupaten Bandung : 7,38
2. Kota Bandung : 6,00
3. Kabupaten Bandung Barat : 5,70
4. Kota Cimahi : 5,75
5. Kabupaten Sumedang : 5,69
6. Kabupaten Garut : 5,17
7. Kabupaten Tasikmalaya : 5,50
8. Kota Tasikmalaya : 5,50
9. Kabupaten Ciamis : 5,02
10. Kota Banjar : 5,35
11. Kabupaten Pangandaran : 5,00

Wilayah III :

Target Sasaran Pertumbuhan Ekonomi :

1. Kabupaten Cirebon : 6,00
2. Kabupaten Indramayu : 6,29
3. Kabupaten Majalengka : 5,49
4. Kabupaten Kuningan : 5,00
5. Kota Cirebon : 5,75



Sektor – Sektor yang memberi Kontribusi terbesar pada PDRB 2015 :

1. Industri Pengolahan
2. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor
3. Kontruksi
4. Transportasi dan pergudangan
5. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Sektor – Sektor yang memberi Kontribusi terbesar pada PDRB 2015 :

1. Industri Pengolahan
2. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor
3. Transportasi dan pergudangan
4. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
5. Pertambangan dan penggalian



PRIORITAS LOKASI PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN DAN TINGKAT PENGANGGURAN



Untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka membutuhkan peran Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten kota.



Penurunan tingkat kemiskinan diarahkan pada lokasi-lokasi yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi (diatas 10 persen) dan memiliki jumlah penduduk miskin yang besar.



Penurunan tingkat pengangguran diarahkan pada lokasi-lokasi yang memiliki tingkat pengangguran yang relatif tinggi (diatas 5 persen) dan memiliki jumlah tingkat pengangguran yang besar.



Prioritas penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran juga diprioritaskan ke daerah yang memiliki rasio gini yang relatif besar.



TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI PER KABUPATEN/KOTA TAHUN 2018

No	Kab/Kota	Target RPJMD LPE
		2018
1	Kota Depok	6,78
2	Kabupaten Bogor	6,80
3	Kota Bogor	6,05
4	Kabupaten Sukabumi	5,25
5	Kota Sukabumi	5,50
6	Kabupaten Cianjur	5,55
7	Kabupaten Bekasi	7,00
8	Kota Bekasi	6,50
9	Kabupaten karawang	7,00
10	Kabupaten Purwakarta	7,61
11	Kabupaten Subang	5,15
12	kabupaten Cirebon	6,00
13	Kota Cirebon	5,75
14	Kabupaten Kuningan	5,00
15	Kabupaten Majalengka	5,49

No	Kab/Kota	Target RPJMD LPE
		2018
16	Kabupaten Indramayu	6,29
17	Kabupaten Bandung	7,38
18	Kota Bandung	6,00
19	Kabupaten Bandung Barat	5,70
20	Kota Cimahi	5,75
21	Kabupaten Sumedang	5,69
22	Kabupaten Garut	5,17
23	Kabupaten Tasikmalaya	5,50
24	Kota Tasikmalaya	5,50
25	Kabupaten Ciamis	5,02
26	Kota Banjar	5,35
27	Kabupaten Pangandaran	5,00

Sumber: RPJMD 2013-2018 Provinsi Jawa Barat



TARGET TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DAN ANGKA KEMISKINAN PERWILAYAH (BKPP) TAHUN 2018

BKPP I

Wilayah I :

Target Sasaran Pertumbuhan Ekonomi

1. Kabupaten Bogor	: 6,80
2. Kabupaten Sukabumi	: 5,25
3. Kabupaten Cianjur	: 5,55
4. Kota Bogor	: 6,05
5. Kota Sukabumi	: 5,50
6. Kota Depok	: 6,78

Sektor – Sektor yang memberi Kontribusi terbesar pada PDRB 2015 :

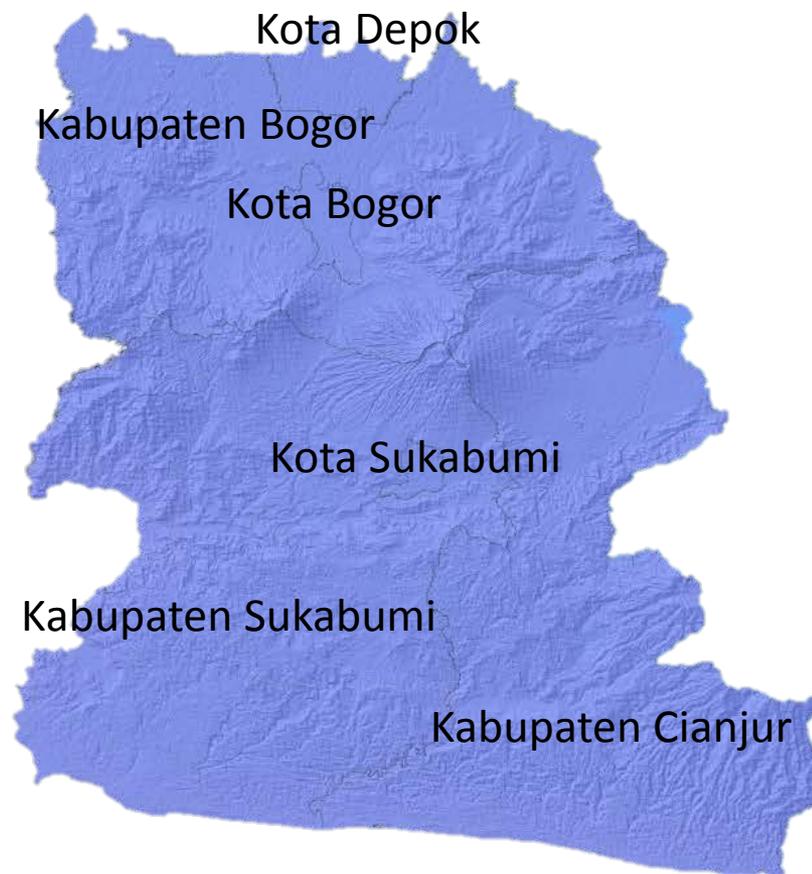
1. Industri Pengolahan
2. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor
3. Kontruksi
4. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Target Tingkat Pengangguran Terbuka

1. Kabupaten Bogor	: 8,50
2. Kabupaten Sukabumi	: 7,24
3. Kabupaten Cianjur	: 7,92
4. Kota Bogor	: 7,06
5. Kota Sukabumi	: 7,50
6. Kota Depok	: 8,56

Target Kemiskinan

1. Kabupaten Bogor	: 4,00
2. Kabupaten Sukabumi	: 4,50
3. Kabupaten Cianjur	: 7,50
4. Kota Bogor	: 5,00
5. Kota Sukabumi	: 5,00
6. Kota Depok	: 2,20



Sumber: RPJMD 2013-2018 Provinsi Jawa Barat



TARGET TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DAN ANGKA KEMISKINAN PERWILAYAH (BKPP) TAHUN 2018

BKPP II

Wilayah I :

Target Sasaran Pertumbuhan Ekonomi

1. Kabupaten Bekasi	: 7,00
2. Kabupaten Purwakarta	: 7,61
3. Kabupaten Subang	: 5,15
4. Kabupaten Karawang	: 7,00
5. Kota Bekasi	: 6,50

Sektor – Sektor yang memberi Kontribusi terbesar pada PDRB 2015 :

1. Industri Pengolahan
2. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor
3. Kontruksi
4. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Target Tingkat Pengangguran Terbuka

1. Kabupaten Bekasi	: 8,02
2. Kabupaten Purwakarta	: 7,23
3. Kabupaten Subang	: 6,82
4. Kabupaten Karawang	: 9,00
5. Kota Bekasi	: 9,20

Target Kemiskinan

1. Kabupaten Bekasi	: 3,50
2. Kabupaten Purwakarta	: 4,50
3. Kabupaten Subang	: 6,45
4. Kabupaten Karawang	: 5,50
5. Kota Bekasi	: 3,50



Sumber: RPJMD 2013-2018 Provinsi Jawa Barat



TARGET TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DAN ANGKA KEMISKINAN PERWILAYAH (BKPP) TAHUN 2018

BKPP III

Wilayah III :

Target Sasaran Pertumbuhan Ekonomi

1. Kabupaten Cirebon	: 6,00
2. Kabupaten Indramayu	: 6,29
3. Kabupaten Majalengka	: 5,49
4. Kabupaten Kuningan	: 5,00
5. Kota Cirebon	: 5,75

Target Tingkat Pengangguran Terbuka

1. Kabupaten Cirebon	: 7,92
2. Kabupaten Indramayu	: 8,40
3. Kabupaten Majalengka	: 5,55
4. Kabupaten Kuningan	: 2,27
5. Kota Cirebon	: 8,52

Sektor – Sektor yang memberi Kontribusi terbesar pada PDRB 2015 :

1. Industri Pengolahan
2. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor
3. Kontruksi
4. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Target Kemiskinan

1. Kabupaten Cirebon	: 8,00
2. Kabupaten Indramayu	: 8,50
3. Kabupaten Majalengka	: 8,14
4. Kabupaten Kuningan	: 7,25
5. Kota Cirebon	: 5,00



Sumber: RPJMD 2013-2018 Provinsi Jawa Barat



TARGET TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DAN ANGKA KEMISKINAN PERWILAYAH (BKPP) TAHUN 2018

BKPP IV

Wilayah IV :

Target Sasaran Pertumbuhan Ekonomi

1. Kabupaten Bandung	: 7,38
2. Kota Bandung	: 6,00
3. Kabupaten Bandung Barat	: 5,70
4. Kota Cimahi	: 5,75
5. Kabupaten Sumedang	: 5,69
6. Kabupaten Garut	: 5,17
7. Kabupaten Tasikmalaya	: 5,50
8. Kota Tasikmalaya	: 5,50
9. Kabupaten Ciamis	: 5,02
10. Kota Banjar	: 5,35
11. Kabupaten Pangandaran	: 5,00

Sektor – Sektor yang memberi Kontribusi terbesar pada PDRB 2015 :

1. Industri Pengolahan
2. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor
3. Kontruksi
4. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan



Sumber: RPJMD 2013-2018 Provinsi Jawa Barat

Target Tingkat Pengangguran Terbuka

1. Kabupaten Bandung	: 7,38
2. Kota Bandung	: 6,00
3. Kabupaten Bandung Barat	: 5,70
4. Kota Cimahi	: 5,75
5. Kabupaten Sumedang	: 5,69
6. Kabupaten Garut	: 5,17
7. Kabupaten Tasikmalaya	: 5,50
8. Kota Tasikmalaya	: 5,50
9. Kabupaten Ciamis	: 5,02
10. Kota Banjar	: 5,35
11. Kabupaten Pangandaran	: 5,00

Target Kemiskinan

1. Kabupaten Bandung	: 7,38
2. Kota Bandung	: 6,00
3. Kabupaten Bandung Barat	: 5,70
4. Kota Cimahi	: 5,75
5. Kabupaten Sumedang	: 5,69
6. Kabupaten Garut	: 5,17
7. Kabupaten Tasikmalaya	: 5,50
8. Kota Tasikmalaya	: 5,50
9. Kabupaten Ciamis	: 5,02
10. Kota Banjar	: 5,35
11. Kabupaten Pangandaran	: 5,00

Tema Pembangunan

2014

Pembangunan Jawa Barat yang Lebih Fokus, Efektif dan Efisien Melalui Sinkronisasi dan Sinergi Berderajat Tinggi Berbasis Multi Pihak dan Mitra Strategis Global Untuk Mewujudkan Masyarakat Jawa Barat yang Lebih Maju dan Sejahtera

2015

Meningkatkan Kualitas Hasil Pembangunan untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Jawa Barat

2016

Satu perencanaan jabar untuk peningkatan daya saing, kemandirian dan kesiapan dalam persaingan global

2017

Memantapkan Pembangunan Menuju Kemandirian Masyarakat Jawa Barat

2018

Percepatan Pembangunan Manusia Bagi Upaya Peningkatan Daya Saing Menuju **Kemandirian Masyarakat**

A. Isu strategis pada aspek kesejahteraan masyarakat, meliputi:

- 1) Ketahanan pangan;
- 2) Kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- 3) Pengangguran; dan
- 4) Ketahanan keluarga.

B. Isu strategis pada aspek pelayanan umum, meliputi:

- 1) Pemerataan, perluasan akses dan mutu pendidikan;
- 2) Peningkatan kualitas, akses dan sistem pelayanan kesehatan;
- 3) infrastruktur strategis, infrastruktur desa dan perdesaan, ;

C. Isu strategis pada aspek daya saing daerah, meliputi:

- 1) Aksesibilitas, kualitas, daya saing, pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan;
- 2) Pengembangan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM);
- 3) Prestasi pemuda dalam lingkup nasional dan internasional;
- 4) Pemilihan Kepala Daerah 2018;
- 5) Akuntabilitas kinerja aparatur;
- 6) Pengembangan destinasi wisata, pusat seni dan budaya serta gelanggang olahraga;
- 7) Lingkungan hidup dan penataan ruang;

PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018

1. Akses dan kualitas pendidikan serta keagamaan

- a. Wajib belajar 12 tahun.
- b. Pendidikan Vokasional.
- c. Penyelenggaraan pendidikan khusus (SLB) dan Pendidikan Inklusif.
- d. Meningkatnya kompetensi dan kesejahteraan guru.
- e. Terselenggaranya program pendidikan di luar domisili (PDD)/ Multikampus.
- f. Peningkatan kualitas dan daya saing pendidikan.
- g. Peningkatan sarana dan prasarana peribadatan

2. Akses dan kualitas pelayanan kesehatan

- a. Peningkatan Pelayanan Kesehatan ibu dan anak.
- b. Mencegah dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular.
- c. Peningkatan kesehatan lingkungan dan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS).
- d. Meningkatnya kualitas, kuantitas dan kesejahteraan tenaga kesehatan.
- e. Meningkatnya pembiayaan kesehatan secara tepat sasaran dan tepat guna.

3. Penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan

- a. Meningkatnya jumlah cakupan listrik rumah tangga.
- b. Meningkatnya jumlah cakupan layanan air bersih dan sanitasi.
- c. Meningkatnya jumlah cakupan layanan pengelolaan sampah perkotaan regional.
- d. Meningkatnya jumlah rumah layak huni serta meningkatnya kualitas lingkungan perumahan.
- e. Meningkatnya kondisi infrastruktur jalan dan perhubungan.
- f. Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur irigasi serta meningkatnya kondisi baik jaringan irigasi.

4. Peningkatan iklim investasi, daya saing usaha dan pariwisata

- a. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi.
- b. Meningkatnya jumlah serapan angkatan kerja.
- c. Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat keahlian.
- d. Meningkatnya mutu, desain produk dan pemasaran usaha.
- e. Mengembangkan Pariwisata dan Perlindungan Budaya Lokal

5. Peningkatan ketahanan pangan

- a. Tersedianya cadangan pangan yang memadai.
- b. Meningkatkan Distribusi, Informasi harga dan Akses Pangan.
- c. Terwujudnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.
- d. Meningkatnya kelembagaan dan kompetensi sumber daya tenaga penyuluh.
- e. Meningkatnya produksi, inovasi dan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, kelautan dan perikanan

6. Peningkatan kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) dan Daya Saing Industri

- a. Meningkatnya akses terhadap modal, pemasaran dan fungsi intermediasi perbankan.
- b. Pemanfaatan teknologi tepat guna semakin berkembang.
- c. Meningkatnya jumlah dan kualitas wirausahawan.
- d. Industri manufaktur dan industri kreatif semakin berkembang.

7. Politik Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan

- a. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean governance).
- b. Meningkatnya kesadaran hukum.
- c. Menyelenggarakan pilkada yang Langsung, Umum, Bebas Dan Rahasia (LUBER) dan Jujur Adil (JURDIL)

8. Pengelolaan sumber daya alam dan penanggulangan bencana

- a. Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan.
- b. Meningkatnya penanganan rehabilitasi lahan kritis serta konservasi hutan dan lahan.
- c. Menurunnya tingkat pencemaran air, udara, dan tanah.
- d. Meningkatnya upaya penanganan pencemaran air di Hulu DAS Citarum.
- e. Meningkatnya kesiapan menghadapi bencana mulai dari mitigasi, penanganan bencana dan pasca bencana

9. Penanggulangan kemiskinan

- a. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran.
- b. Meningkatnya pemberdayaan usaha ekonomi produktif keluarga miskin/kelompok masyarakat miskin

10. Peningkatan penataan ruang daerah (F)

- a. Meningkatnya kualitas perencanaan ruang.
- b. Meningkatnya konsistensi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang.
- c. Meningkatnya kualitas pengendalian pemanfaatan ruang

11. Peningkatan Kualitas kependudukan

- a. Meningkatnya ketahanan keluarga.
- b. Terselenggaranya Pengarusutamaan Gender (PUG).
- c. Pengendalian Kuantitas dan Mobilitas Kependudukan

SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

INDIKASI KEGIATAN

2.1.1. Penguatan rumah sakit milik Provinsi

2.1.2. Penguatan sistem rujukan berbasis sistem regionalisasi

2.1.3. Perluasan pelayanan kesehatan bagi penduduk di daerah

2.1.4. Regulasi untuk akses pelayanan kesehatan lintas batas bagi masyarakat luar daerah/Provinsi

KEGIATAN PRIORITAS

Catatan :

Untuk penentuan Kegiatan Prioritas menggunakan **POHON KINERJA**

PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

(SASARAN 1)

2.1. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak

(SASARAN 5)

2.5. Meningkatnya kualitas, kuantitas dan kesejahteraan tenaga kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN : 2. Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

(SASARAN 2)

2.2. Mencegah dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular

(SASARAN 4)

2.4. Meningkatnya kualitas, kuantitas dan kesejahteraan tenaga kesehatan

(SASARAN 3)

2.3. Peningkatan kesehatan lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

Highlight Sasaran Prioritas Pembangunan : PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

PRIORITAS PEMBANGUNAN : 2. AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN

SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN : 2.1 Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak

Indikasi Kegiatan	Indikasi Kegiatan	Indikasi Kegiatan	Indikasi Kegiatan
2.1.1 Penguatan rumah sakit milik Provinsi	2.1.2 Penguatan sistem rujukan berbasis sistem regionalisasi	2.1.3 Perluasan pelayanan kesehatan bagi penduduk di daerah	2.1.4 Regulasi untuk akses pelayanan kesehatan lintas batas bagi masyarakat luar daerah/Provinsi
Indikasi Lokasi	Indikasi Lokasi	Indikasi Lokasi	Indikasi Lokasi
.....
KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
.....
.....
.....
.....
.....

Dibahas Pada:
FORUM PERANGKAT DAERAH

CONTOH

Contoh:

Highlight Indikasi Kegiatan : 2.1.3 Perluasan Pelayanan Kesehatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN : 2. AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN

SASARAN PRIORITAS

2.1 Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak

INDIKASI KEGIATAN

2.1.3 Perluasan pelayanan kesehatan bagi penduduk di daerah

KEGIATAN PRIORITAS

1. Pembangunan Puskesmas PONED
2. Pengadaan Alat Kesehatan
3. dst

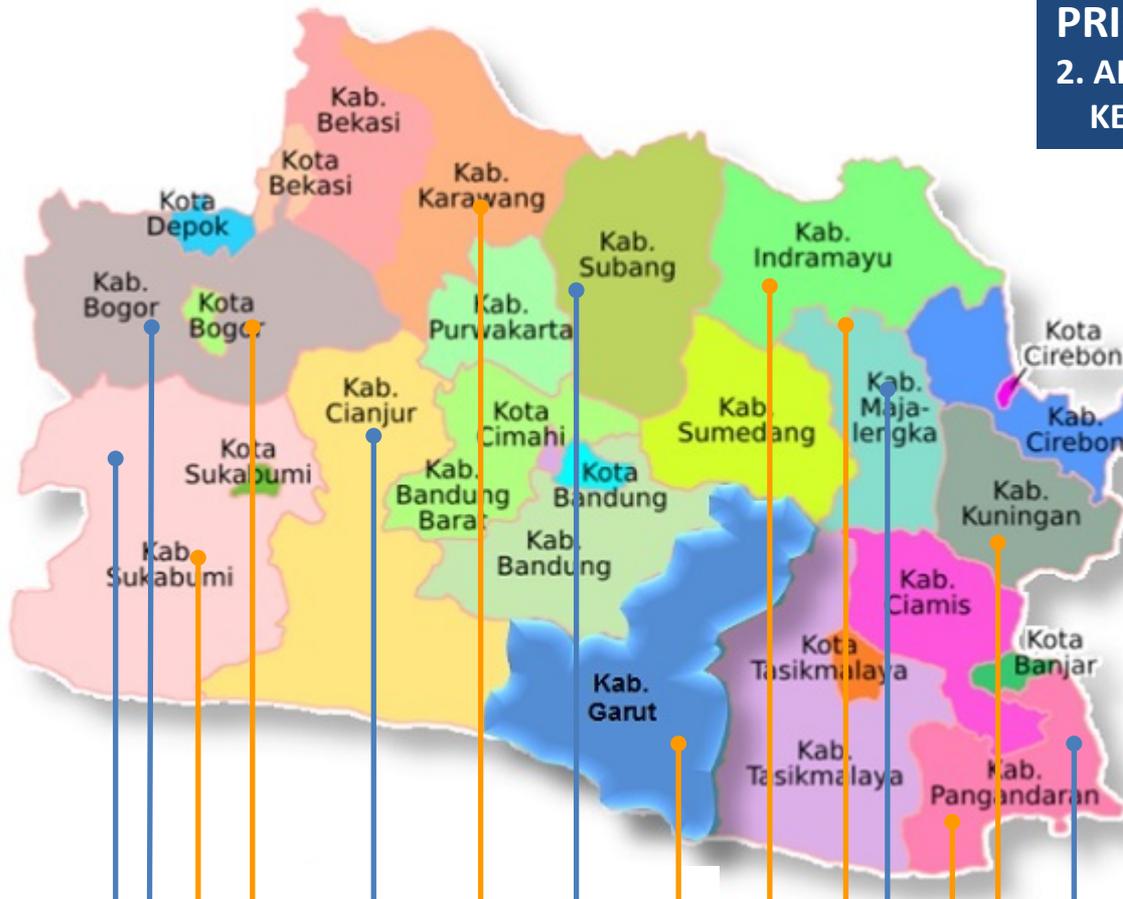
Dibahas Pada
FORUM PERANGKAT DAERAH

INDIKASI LOKASI



HIGHLIGHT Kegiatan Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

**PRIORITAS PEMBANGUNAN :
2. AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN
KESEHATAN**



1. Pembangunan Puskesmas PONED

2. Pengadaan Alat Kesehatan

SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

INDIKASI KEGIATAN

3.1.1 Penanganan Kawasan kumuh

3.1.2 Pembangunan Rutilahu

3.1.3 Penataan Lingkungan Perumahan



KEGIATAN PRIORITAS

Sasaran 4 : Meningkatnya jumlah rumah layak huni serta meningkatnya kualitas lingkungan perumahan



Catatan :

Untuk penentuan Kegiatan Prioritas menggunakan **POHON KINERJA**

Highlight Sasaran Prioritas Pembangunan : Meningkatnya jumlah rumah layak huni serta meningkatnya kualitas lingkungan perumahan

PRIORITAS PEMBANGUNAN : 3. Penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan

SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN : 3.1 Meningkatnya jumlah rumah layak huni serta meningkatnya kualitas lingkungan perumahan

Indikasi Kegiatan
3.1.1 Penanganan Kawasan kumuh

Indikasi Lokasi
.....

KEGIATAN PRIORITAS
.....
.....
.....

Indikasi Kegiatan
3.1.2 Pembangunan Rutilahu

Indikasi Lokasi
.....

KEGIATAN PRIORITAS
.....
.....
.....

CONTOH

Indikasi Kegiatan
3.1.3 Penataan Lingkungan Perumahan

Indikasi Lokasi
.....

KEGIATAN PRIORITAS
.....
.....
.....

Dibahas Pada:
FORUM PERANGKAT DAERAH →

Highlight Indikasi Kegiatan :

3.1.2 Pembangunan Rutilahu Perkotaan

PRIORITAS PEMBANGUNAN :

3. *Penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan*

SASARAN PRIORITAS

3.1 Meningkatnya jumlah rumah layak huni serta meningkatnya kualitas lingkungan perumahan

INDIKASI KEGIATAN

3.1.2 Pembangunan Rutilahu

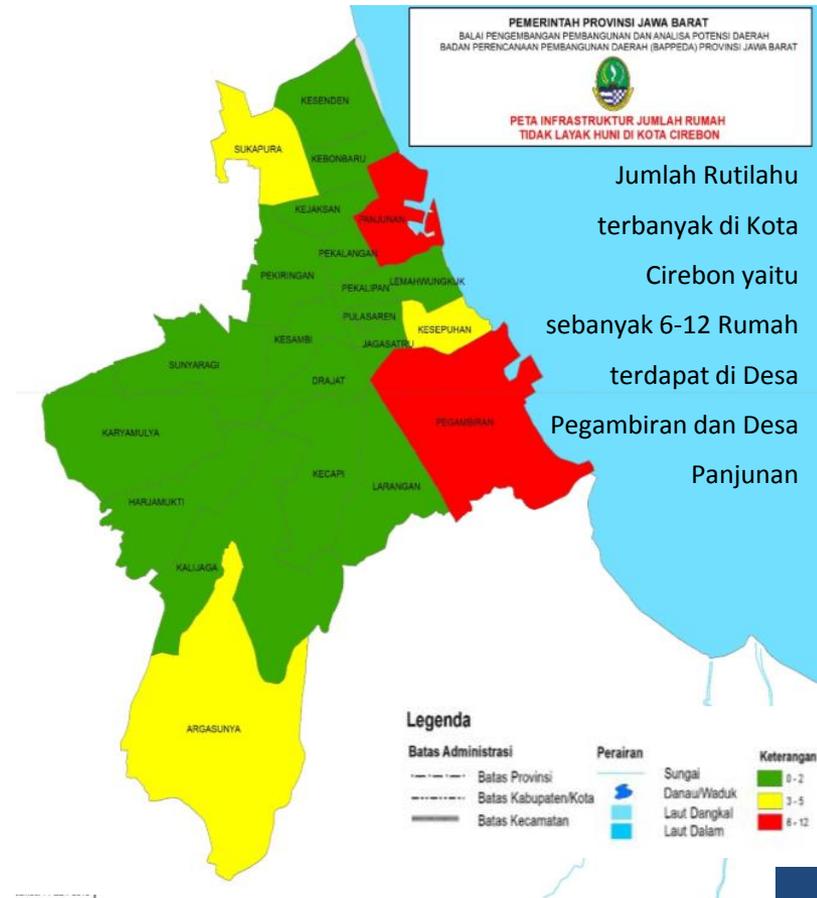
KEGIATAN PRIORITAS

1. Pembangunan Rutilahu Perkotaan

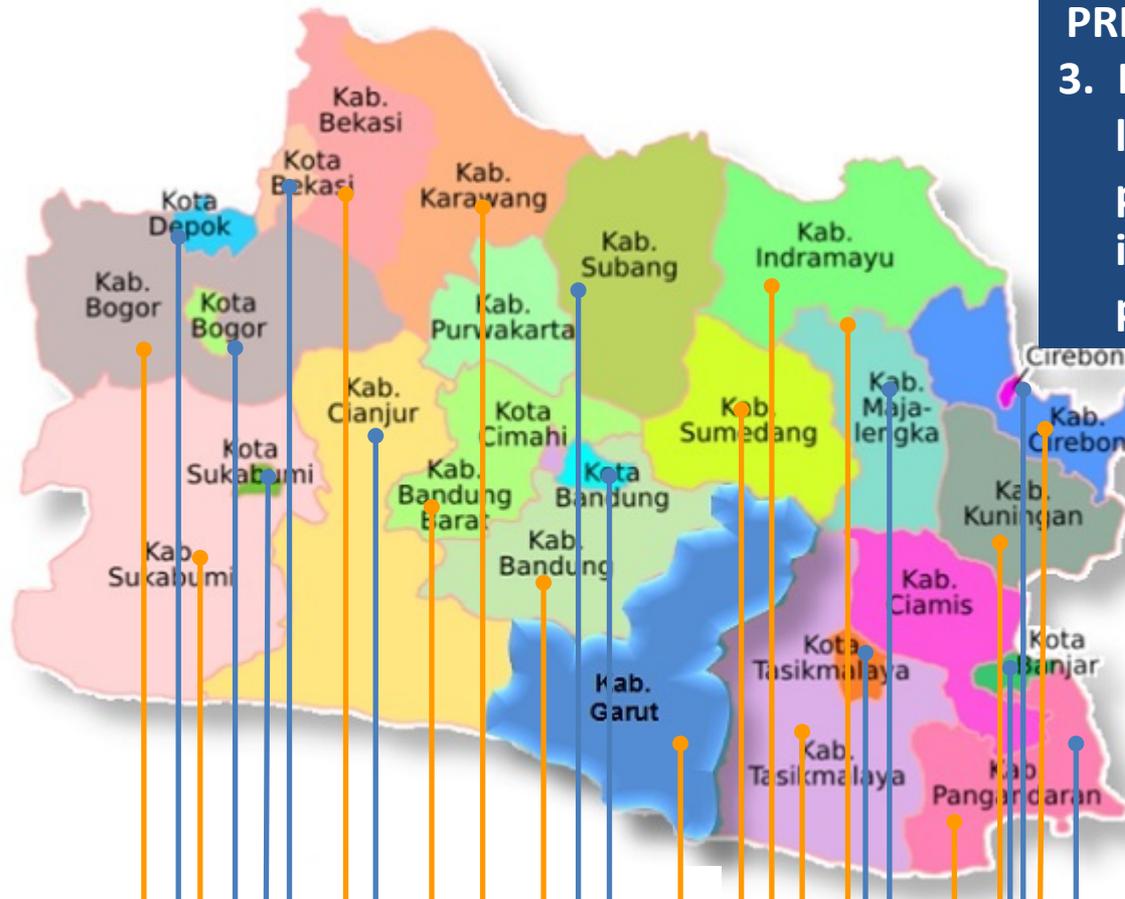
2. Pembangunan Rutilahu Perdesaan

**Dibahas Pada
FORUM PERANGKAT DAERAH**

INDIKASI LOKASI



HIGHLIGHT Kegiatan Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2018



PRIORITAS PEMBANGUNAN :
3. Penyediaan infrastruktur layanan dasar permukiman dan infrastruktur strategis di perkotaan dan perdesaan

1. Pembangunan Rutilahu Perkotaan

2. Pembangunan Rutilahu Perdesaan



4

Kebijakan Pendanaan Pembangunan Tahun 2018

KEBIJAKAN PENDANAAN 2018

PENDAPATAN

1. Memantapkan Kelembagaan;
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi;
3. Koordinasi Pusat-Daerah;
4. Meningkatkan Deviden BUMD;
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat;
6. Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan Balai Penghasil;
7. Meningkatkan pengelolaan asset daerah.

PEMBIAYAAN

A. Penerimaan Pembiayaan

SiLPA Tahunan

B. Pengeluaran Pembiayaan

1. Penyertaan modal;
2. Kredit Cinta Rayat (KCR)

BELANJA

1. RPJMD 2013-2018, RPJMN 2015-2019, dan Prioritas Pembangunan, Janji Gubernur 2013-2018, Sustainable Development Goals (SDGs), Good Governance;
2. Fungsi pendidikan 20% dari total belanja;
3. Fungsi kesehatan 10% dari total belanja;
4. Bantuan keuangan Kab/Kota, bantuan Desa, Hibah, Bansos dan Subsidi.
5. Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat.
6. **Pendukung Pelaksanaan Pilkada Serentak**
7. **Pendukung dan Penuntasan kegiatan unggulan Provinsi**
8. **Pendukung Penyelenggaraan Asian Games Ke XVIII**
9. **Pemberian penghargaan bagi insan olahraga**

Kriteria Substansi Usulan Kegiatan Prioritas

Perangkat Daerah

1. Kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan Tahun 2018 (RPJMD 2013-2018).
2. Hasil evaluasi RPJMD 2013-2018 berupa Pendukung dan Penuntasan kegiatan unggulan dan Prioritas Pembangunan Provinsi.
3. Kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan nasional tahun 2018 (RPJMN 2015-2019).
4. Kegiatan yang merupakan kewajiban Provinsi (merujuk UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).
5. Merupakan kegiatan lanjutan (Sudah ada komitmen/MoU).
6. Tindak lanjut/Amanat Peraturan Perundangan (pendidikan 20%, kesehatan 10%, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)).
7. Pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditentukan oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah.
- 8. Pendukung persiapan rencana pelaksanaan Pilkada Serentak.**
9. Kegiatan fixed cost dan pelayanan dasar PD.

Kabupaten/Kota

1. Kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan Tahun 2018 (RPJMD 2013-2018).
2. Komitmen antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, atau tindak lanjut MoU.
3. Tindak lanjut/Amanat Peraturan Perundangan (pendidikan 20%, kesehatan 10%).
- 4. Pendukung persiapan rencana pelaksanaan Pilkada Serentak.**



5

Mekanisme Rangkaian Musrenbang Tahun 2018

Jadwal Pelaksanaan Rangkaian Musrenbang Tahun 2017

NO.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pembukaan Rangkaian Musrenbang	16 Februari 2017	BKPP III Cirebon Provinsi Jawa Barat
2.	Musrenbang Kabupaten/Kota	16 Februari – 10 Maret 2017	Kabupaten/Kota di Jawa Barat
3.	Forum Perangkat Daerah	14 - 17 Maret 2017	PD Provinsi Jawa Barat
4.	Forum Gabungan Perangkat Daerah Provinsi	23 Maret 2017	Bappeda Provinsi Jawa Barat
5.	Pra Musrenbang (Pohon Kinerja)	27 Maret – 01 April 2017	
	Wilayah I (BKPP Wilayah Bogor)	27 Maret 2017	Botani Square
	Wilayah II (BKPP Wilayah Purwakarta)	29 Maret 2017	Jatiluhur
	Wilayah III (BKPP Wilayah Cirebon)	30 Maret 2017	Kantor BKPP III
	Wilayah IV/Priangan Barat	31 Maret 2017	Kantor Pemkab Pangandaran
	Wilayah IV/Priangan Timur	01 April 2017	Kantor Pemkab Pangandaran
6.	Rakor Bidang Tindaklanjut Pra Musrenbang (Pohon Kinerja)	03 – 04 April 2017	Terserah Bidang Bappeda
7.	Rapat Koordinasi Teknis Bappeda Provinsi Jawa Barat dengan Bappeda Kabupaten/Kota	06 April 2017	Bappeda Provinsi Jawa Barat
8.	Virtual Musrenbang	10 April 2017	Bappeda Provinsi Jawa Barat
9.	Musrenbang Provinsi	11 – 13 April 2017	Tentatif
10.	Pasca Musrenbang (BL) bersama TAPD	Tentatif	Bappeda Provinsi Jawa Barat

Tahapan Perencanaan Provinsi

Jawa Barat

3 – 4 April 2017

Rakor Bidang
Bappeda
Provinsi

Belanja
Langsung

BTL
Top Down

Draft Ranwal
RKPD 2018

Rancangan
Awal RKPD
2018

Rancangan
Awal RKPD
2018

Draft
Rancangan
RKPD 2018

Draft
Rancangan
RKPD 2018

Draft
Rancangan
RKPD 2018

Rancangan
RKPD 2018

Rancangan
Akhir RKPD
2018

16 Februari 2017

13 – 17 Maret 2017

23 Maret 2017

27 Maret – 1 April 2017

6 April 2017

10 April 2017

11-13 April 2017

1
Pembukaan
Rangkaian
Musrenbang
RKPD

2
Forum
Perangkat
Daerah

3
Forum
Gabungan
Perangkat
Daerah

4
Pra
Musrenbang
Provinsi

5
Rakortek
Bappeda
Provinsi &
Kab/Kota

6
Virtual
Musrenbang
Provinsi

7
MUSRENBANG
Provinsi

8
Pasca
MUSRENBANG
Provinsi

BTL
Bottom Up

Musrenbang
Kabupaten/
Kota

17 Feb – 10 Maret 2017

Belanja
Langsung

BTL
Bottom Up

BTL
Top Down

Belanja
Langsung

BTL
Top
Down



PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 2018

SISTEM PERENCANAAN



rkpdjabaronline.jabarprov.go.id

SISTEM PENGANGGARAN



ppasjabaronline



Aplikasi
RKA/DPA

TAPD

Online ?



e-SAKIP
(Biro Organisasi)



e-MONEV
(Bappeda)



SIPKD
(BPKAD)



RENCANA TINDAK LANJUT

PERANGKAT DAERAH/BIRO PROVINSI

1. PD/Biro yang baru terbentuk, atau yang berubah nomenklatur dan tupoksi agar **SEGERA** menyusun dokumen Rencana Strategis (**RENSTRA**) sebagai dasar untuk penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 dengan memperhatikan Rancangan Awal RKPD Tahun 2018;
2. **Verifikasi** Penyusunan Renstra oleh Bappeda Provinsi akan dilaksanakan pada **27 – 28 Februari 2017**;
3. Menyampaikan usulan program dan kegiatan prioritas tahun 2018 dengan **mengacu** kepada **11 Prioritas Pembangunan** Provinsi Jawa Barat Tahun 2018;
4. Berkoordinasi dengan Bappeda Provinsi untuk menelaah kegiatan yang sifatnya **BTL Top Down**;
5. Melaksanakan Forum Perangkat Daerah sesuai dengan jadwal (13 – 17 Maret 2017)

KABUPATEN/KOTA

1. **Menyusun dokumen RKPD** Kabupaten/Kota 2018 dengan memperhatikan Rancangan Awal RKPD Provinsi dan RKP Pemerintah Pusat;
2. Menyampaikan usulan program dan kegiatan prioritas tahun 2018 dengan mengacu kepada **11 Prioritas Pembangunan** Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 melalui **RKPDJabar Online 2101**;
3. Melaksanakan **Musrenbang Kabupaten/Kota** sesuai dengan jadwal dan aturan yang berlaku.



MARI KITA KEMBANGKAN DAN GUNAKAN

SATU DATA

PEMBANGUNAN JAWA BARAT

Sukses Perencanaan Sukses Implementasi



TERIMA KASIH

SMS JABAR MEMBANGUN
0811 200 5500

Informasi lebih lanjut :

- Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
Jalan Diponegoro No.22 Bandung
Telp. (022) 4204483
- Bappeda Provinsi Jawa Barat
Jalan. Ir H.Juanda No. 287
Telp. (022) 251 6061, Fax, (022) 2510731
Website : <http://www.jabarprov.go.id>, www.bappeda.jabarprov.go.id

RKPDJabar -ONLINE

www.rkpdjabaronline.jabarprov.go.id

KM-0 Pro Poor JABAR-ONLINE

SMS SATU DATA JABAR
08778 200 5500
Contoh: RLS*JAWA
BARAT*2011#